



PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 47 TAHUN 2018  
TENTANG  
STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL PROVINSI BANTEN TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi Banten Tahun 2018-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 259);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 41);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010

- Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Berita Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
  13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten (Lembaran Berita Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL PROVINSI BANTEN TAHUN 2018-2022;

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut STRADA PPDT adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 5 (lima) tahun di tingkat Provinsi Banten yang merupakan bagian integral dari RPJMD Provinsi Banten dengan memperhatikan STRANAS PPDT.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan STRADA PPDT Tahun 2018-2022 adalah untuk memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan kepada Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Perangkat Daerah Provinsi Banten, Pemerintah

Kabupaten Lebak dan Pandeglang, serta masyarakat agar tercapai optimalisasi pembangunan di Provinsi Banten.

- (2) Tujuan penyusunan STRADA PPDT Tahun 2018-2022 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan daerah tertinggal.
- (3) Sasaran penyusunan STRADA PPDT Tahun 2018-2022 adalah memberikan pedoman dalam menyusun rencana aksi pembangunan daerah tertinggal pada setiap tahunnya.

### Pasal 3

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan STRADA PPDT dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirincikan dalam anggaran masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan STRADA PPDT dapat diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

STRADA PPDT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, dengan sistematika sebagai berikut :

- |         |   |   |
|---------|---|---|
| BAB I   | : | PENDAHULUAN   |
| BAB II  | : | GAMBARAN UMUM WILAYAH   |
| BAB III | : | PENDEKATAN, PRINSIP, DAN POLA PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DI PROVINSI BANTEN |
| BAB IV  | : | SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DI PROVINSI BANTEN           |
| BAB V   | : | PENUTUP   |

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 7 November 2018

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 7 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

INO S. RAWITA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680805 199803 1 010

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu ke arah yang lebih baik sesuai yang direncanakan. Demikian pula dengan pembangunan daerah tertinggal, yang merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh masyarakat dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah yang maju dengan masyarakat yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya. Untuk itu, pembangunan daerah tertinggal didalamnya mencakup upaya pembangunan yang menyeluruh dan komprehensif meliputi pembangunan di segala bidang baik infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya maupun keamanan.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019 mengategorikan 122 kabupaten sebagai daerah tertinggal sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019. Pengkategorian daerah tertinggal tersebut didasarkan pendekatan pada 6 (enam) kriteria dasar, yaitu : perekonomian masyarakat, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan lokal (celah fiskal), aksesibilitas dan karakteristik daerah, serta berdasarkan kabupaten yang berada di daerah perbatasan antarnegara dan gugusan pulau-pulau kecil, daerah rawan bencana, dan rawan konflik.

Dari hasil kajian Kemendesa (2017) menunjukkan bahwa Banten merupakan salah satu provinsi yang memiliki 2 (dua) kabupaten yang termasuk daerah tertinggal yakni Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Faktor penyebab utama ketertinggalan kedua daerah tersebut adalah ketertinggalan pada kriteria sumber daya manusia, kriteria sarana dan prasarana, kriteria karakteristik daerah, serta aksesibilitas. Keadaan ini dapat dilihat dari capaian

pembangunan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta karakteristik daerah. Jika dibandingkan dengan sasaran nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan 3 sasaran utama, yakni pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, dan indeks pembangunan manusia yang dihitung berdasarkan 4 kabupaten di Banten, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Serang. Pada 2019 ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,49%. Target ini masih berada dibawah target nasional, yakni kisaran 6,9% - 7,1% (RPJMD Banten 2017 - 2022, data diolah), Kabupaten Pandeglang sebesar 5,49% (Banten Dalam Angka, 2017), dan Lebak 5,22% (RPJMD Lebak 2014 - 2019). Jadi dapat dikatakan bahwa untuk sasaran target sasaran penurunan kemiskinan dan pembangunan daerah tertinggal diperkirakan dapat dicapai pada 2019.

Sasaran PPDT	Nasional	2019		
	2019	Banten)*	Pandeglang	Lebak)***
Pertumbuhan Ekonomi	6,9 -7,1%	6,49%	5,49)**	5,22
% Penduduk Miskin	15 - 15,5%	6,52%	7,77	6,10
IPM	62,36	66,58	62,78)**	70,22

Keterangan: )\* RPJMD Banten (2017 - 2022), data diolah menurut 4 kabupaten di Banten; )\*\* (Banten Dalam Angka, 2017); )\*\*\* RPJMD Lebak (2014 - 2019)

Sumber: Banten Dalam Angka (2016), IPM Banten (2016), Laporan Kemiskinan Banten (BPS Banten, September 2017)

Demikian halnya untuk sasaran penurunan persentase penduduk miskin pada 2019, di Kabupaten Pandeglang sebesar 7,77% dan Kabupaten Lebak sebesar 6,10% yang berarti jauh di bawah sasaran nasional. Namun, jika dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Banten, maka kedua daerah tersebut memiliki tingkat penduduk miskin yang paling tinggi. Sasaran pembangunan manusia yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM), maka IPM Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang masih lebih tinggi dibandingkan dengan sasaran nasional. Hal ini dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia di kedua daerah tersebut telah terlampaui. Tetapi jika dibandingkan dengan Banten sendiri dan Kabupaten/Kota di Banten, maka pembangunan manusia di kedua kabupaten tersebut

masih tertinggal. Harapannya, pada tahun 2019 kedua kabupaten tersebut telah lepas dari kategori daerah tertinggal.

Perkembangan capaian pembangunan manusia di Banten terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat diketahui dari naiknya angka IPM secara konsisten selama periode 2011-2016. Adapun besaran kenaikannya senilai 3,42 poin, yang setara dengan 0,49 poin per tahun (Gambar 1.1). Angka IPM Banten pada tahun 2016 mencapai 70,96. Berarti, tingkat pencapaian pembangunan manusianya dapat dikatakan masih sekitar 71 persen dari kondisi pembangunan manusia yang ideal (IPM ideal = 100). Namun demikian, dengan capaian sebesar itu, Banten menempati urutan kedelapan di Indonesia dalam hal pembangunan manusia. Hanya saja, status pembangunan manusianya belum mengalami kenaikan, yakni masih berada pada kategori “Tinggi” ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ ). Banten sendiri mulai menempati status pembangunan manusia kategori “Tinggi” sejak tahun 2015, setelah sebelumnya berada pada kategori “Sedang” ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ ).



Sumber: IPM Banten (BPS Banten, 2016).

Gambar 1.1: Nilai dan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten, 2010-2016

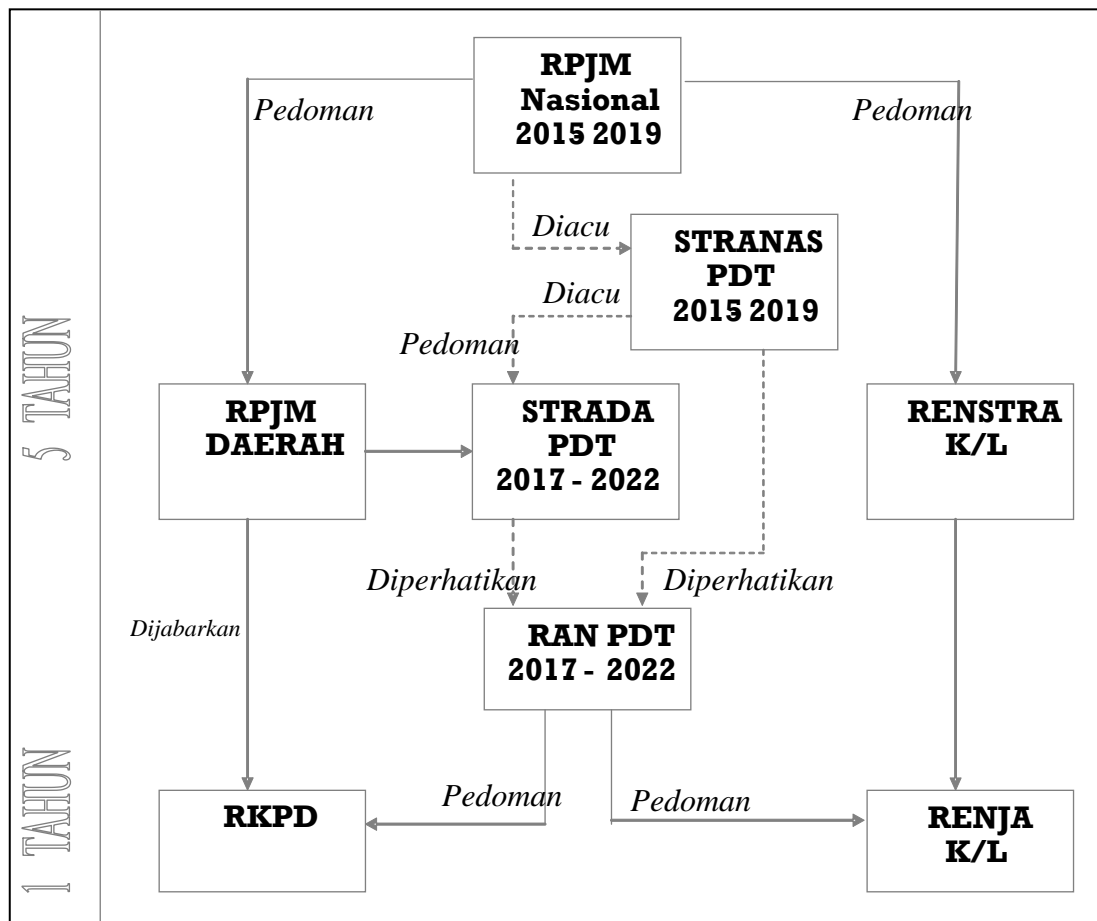
Keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya diukur dari tingginya angka IPM, akan tetapi juga harus dilihat dari kecepatan dalam peningkatannya. Untuk mengukur kecepatan peningkatan capaian pembangunan manusia, digunakan angka pertumbuhan IPM. Dari gambar di atas sejak 2012 pertumbuhan capaian pembangunan manusia mengalami perlambatan hingga 2015, yakni dari 1,03 turun menjadi 0,80, hingga 0,55. Namun pada 2016 kembali mengalami



peningkatan capaian pertumbuhan hingga 0,98, serta pada 2019, IPM Banten ditergetkan menjadi 72,20 atau naik 1,24.

Saat ini, permasalahan utama di Banten adalah masih tingginya jumlah penduduk miskin, rendahnya sumber daya manusia, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai khususnya di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Atas dasar permasalahan tersebut, maka dibutuhkan strategi untuk mengentaskan kedua daerah tersebut sebagai daerah tertinggal menjadi daerah yang tidak tertinggal (berkembang). Upaya nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten adalah menyusun Strada Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2017 – 2022 sebagai penjabaran RPJMD Banten 2017 – 2022. Strategi tersebut tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 beserta lampirannya, mengamanatkan perlunya prioritas pembangunan kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di wilayah tertinggal dan keberpihakan yang besar dari Pemerintah di tingkat nasional, sedangkan di tingkat daerah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang merupakan acuan berbagai pihak (*stakeholders*) baik pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah tertinggal.

Guna menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program baik secara vertikal maupun horisontal, maka penyusunan Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) Provinsi Banten selain mengacu pada STRANAS PDT juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2017-2022. Berikut adalah hubungan dokumen STRADA PPDT dengan dokumen perencanaan lainnya.



Gambar 1.1. Hubungan Dokumen STRADA PPDT dan Dokumen Perencanaan Lainnya

## 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

STRADA PPDT Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan dan arah bersama bagi pemerintah, swasta, masyarakat maupun berbagai pihak guna mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Sedangkan maksud dan tujuan penyusunan STRADA PDT adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan gambaran kondisi daerah seperti aspek geografis, kependudukan, ketersediaan infrastruktur, ekonomi menyeluruh, sosial dan budaya;
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketertinggalan;
- c. Memberikan arah kebijakan dan strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal, sehingga menjamin terlenggaranya operasionalisasi percepatan pembangunan daerah tertinggal di Provin Banten;

- d. Memberikan gambaran tentang program, kegiatan prioritas daerah, serta rencana sumber pendanaan pembangunan daerah;
- e. mempercepat pengurangan kesenjangan antardaerah tertinggal dengan non tertinggal di Provinsi Banten;
- f. mempercepat terpenuhinya kebutuhan dasar, serta sarana dan prasarana dasar daerah tertinggal di Banten;
- g. meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, serta evaluasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal di Banten.

### 1.3 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan STRADA PPDT Provinsi Banten 2017 – 2021 ini, peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum (rujukan), antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- c. U Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah 78 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- f. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- g. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019 ;
- h. Peraturan Presiden Nomor 106 tentang Kawasan Sains dan Teknologi;
- i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;

- j. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
- k. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2010-2030.

#### 1.4 KERANGKA WAKTU

Waktu Pelaksanaan penyusunan STRADA PPDT Provinsi Banten dimulai Bulan Januari sampai Bulan Maret 2018 dengan tahapan penjadwalan sebagai berikut :

Tabel 1.1. Time Table Pelaksanaan Penyusunan STRADA PPDT  
2017 - 2022

NO	KEGIATAN	JANUARI				FEBRUARI				MARET			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pembentukan Tim Penyusun STRADA PPDT			■	■								
2	Penyusunan Rancangan Awal STRADA PPDT			■	■	■							
3	Konsolidasi Program Sektoral					■							
4	Rapat kabupaten/kota					■							
5	Penyusunan Rancangan Akhir STRADA PPDT						■	■					
6	Penetapan Peraturan Gubernur tentang STRADA PPDT								■				
7	Workshop Lokakarya Daerah									■			
8	Penetapan RAN PPDT 2019										■		

## 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN STRADA PPDT

STRADA PPDT Provinsi Banten 2017-2022 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, kerangka waktu, dan sistematika penulisan.

### BAB II. GAMBARAN UMUM WILAYAH

Bab ini menguraikan gambaran umum wilayah Banten yang meliputi aspek geografis, aspek demografis, aspek ekonomi, dan sosial.

### BAB III. PENDEKATAN, PRINSIP, DAN POLA PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DI BANTEN

Bab ini menguraikan pendekatan percepatan pembangunan daerah tertinggal, prinsip pelaksanaan, pola pelaksanaan percepatan, dan prioritas pembangunan wilayah sesuai dengan kewenangan provinsi Banten.

### BAB IV. SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN TERTINGGAL PER KABUPATEN/KOTA

Bab ini berisikan sasaran dan faktor penyebab utama ketertinggalan, arah kebijakan, dan strategi pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

### BAB V. PENUTUP

Bab ini memberikan gambaran tentang kesimpulan dari dokumen Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi Banten 2017-2022.

## BAB II

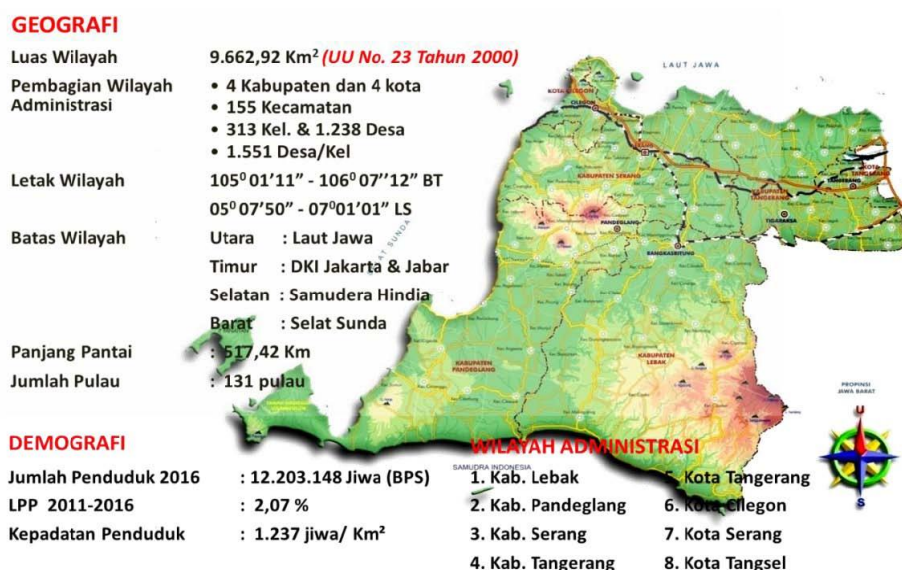
### GAMBARAN UMUM WILAYAH

#### 2.1 Aspek Geografis

Luas wilayah Provinsi Banten yaitu sebesar 8.651,20 km<sup>2</sup>, dan secara Administratif Provinsi Banten terdiri dari 4 (empat) kabupaten, yaitu Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang dan 4 (empat) Kota yaitu Tangerang, Cilegon, Serang dan Tangerang Selatan.

Wilayah Provinsi Banten berada pada batas astronomis 105°01'11"- 106°07'12" Bujur Timur dan 05°07'50"- 07°01'01" Lintang Selatan, posisinya sangat strategis karena terletak pada lintasan perdagangan nasional dan internasional yakni Selat Sunda yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Disamping itu, Provinsi Banten juga merupakan pintu gerbang yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Banten yaitu:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda;
- Sebelah Timur berbatasan dengan DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat;
- Sebelah Utara dengan Laut Jawa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia.



Sumber : RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Banten

Adapun jumlah kecamatan dan kelurahan/desa pada wilayah administrasi pemerintahan di Provinsi Banten adalah sebagaimana di bawah ini :

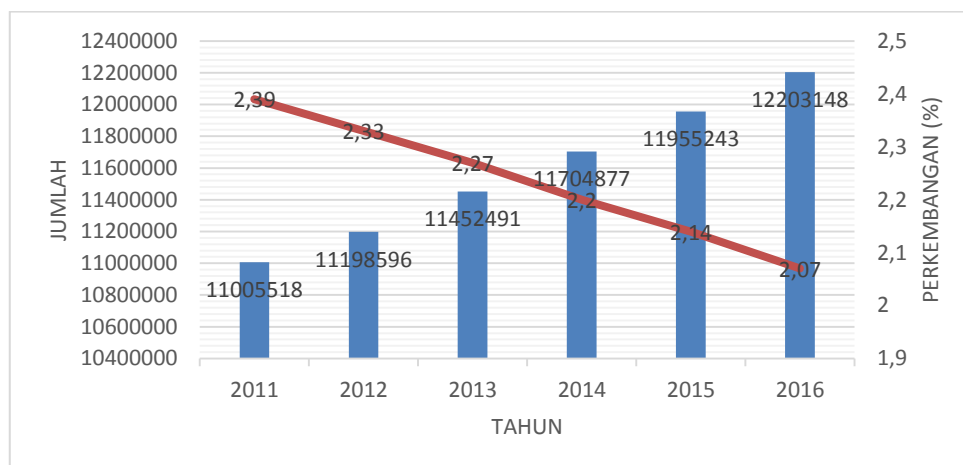
Tabel 2.1 Luas Wilayah Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa Pada Wilayah Administrasi di Provinsi Banten Tahun 2016

KABUPATEN/KOTA	LUAS WILAYAH (Km <sup>2</sup> )	KECAMATAN	DESA	KELURAHAN
<b>Kabupaten</b>				
1. Pandeglang	2.746,89	35	326	13
2. Lebak	3.426,56	28	340	5
3. Tangerang	1.011,86	29	246	28
4. Serang	1.734,28	29	326	
<b>Kota</b>				
1. Tangerang	153,93	13	0	104
2. Cilegon	175,50	8	0	43
3. Serang	266,71	6	0	66
4. Tangerang Selatan	147,19	7	0	54
<b>Banten</b>	<b>9.662,92</b>	<b>155</b>	<b>1238</b>	<b>313</b>

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2017

## 2.2 Aspek Demografis

Berdasarkan data hasil sensus penduduk, Provinsi Banten menunjukkan pertumbuhan jumlah yang terus meningkat setiap tahun, baik penduduk laki-laki maupun perempuan. Penduduk Banten tahun 2016 sebanyak 12.203.148 jiwa yang terdiri atas 6.221.640 jiwa penduduk laki-laki dan 5.981.508 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 2,07 persen.

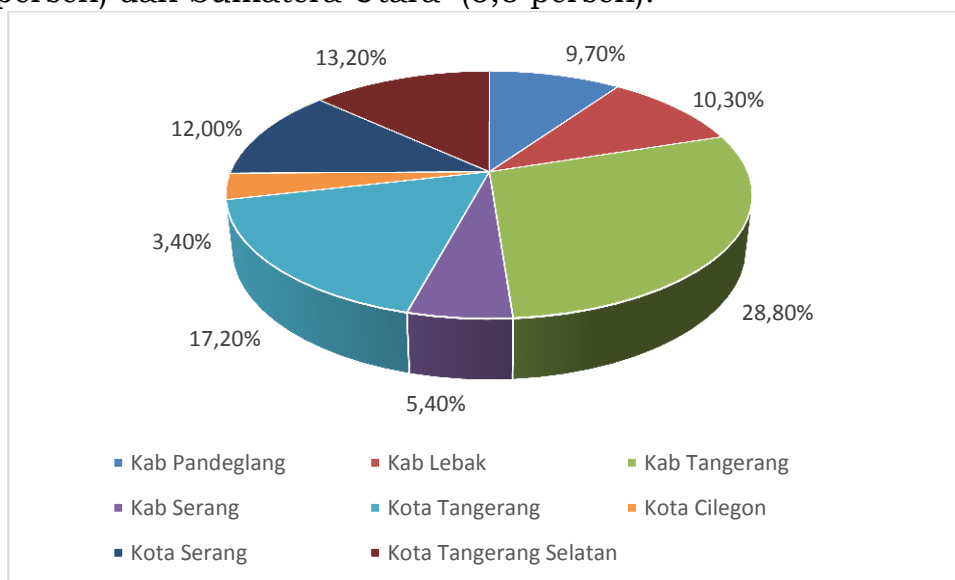


Sumber : Banten Dalam Angka, 2017

Gambar 2.2 Perkembangan Penduduk Provinsi Banten 2012-2016

Pertumbuhan penduduk Banten yang tumbuh pesat hingga mencapai rata-rata 2,20 persen per tahun, melebihi rata-rata

pertumbuhan penduduk Nasional yang hanya tumbuh 1,34 persen per tahun. Akibatnya, proporsi penduduk Banten terhadap total penduduk Indonesia meningkat dari 4,5 persen menjadi 4,8 persen. Oleh karena itu, Banten berhasil mempertahankan posisinya sebagai provinsi dengan populasi terbanyak kelima di Indonesia, setelah Jawa Barat (18,3 persen), Jawa Timur (15,0 persen), Jawa Tengah (13,1 persen) dan Sumatera Utara (5,5 persen).



Sumber: Statistik Daerah Provinsi Banten (2017)

Gambar 2.3 Komposisi Penduduk Banten Menurut Kabupaten/Kota 2017

Penduduk Banten, secara geografis tidaklah terdistribusi dengan merata, karena lebih banyak yang mendiami wilayah Banten Utara. Kondisi ini dapat terjadi karena Banten Utara merupakan salah satu daerah tujuan utama migrasi di Indonesia, yang antara lain akibat perannya sebagai daerah penyangga atau hinterland bagi Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu secara spasial, terlihat bahwa Kabupaten Tangerang merupakan daerah yang terbanyak penduduknya, dengan persentase mencapai 28,8 persen (3,6 juta orang). Sebaliknya, yang paling sedikit adalah Kota Cilegon, dengan persentase hanya 3,4 persen (0,4 juta orang).

## 2.3 Aspek Pembangunan Manusia dan Pendidikan

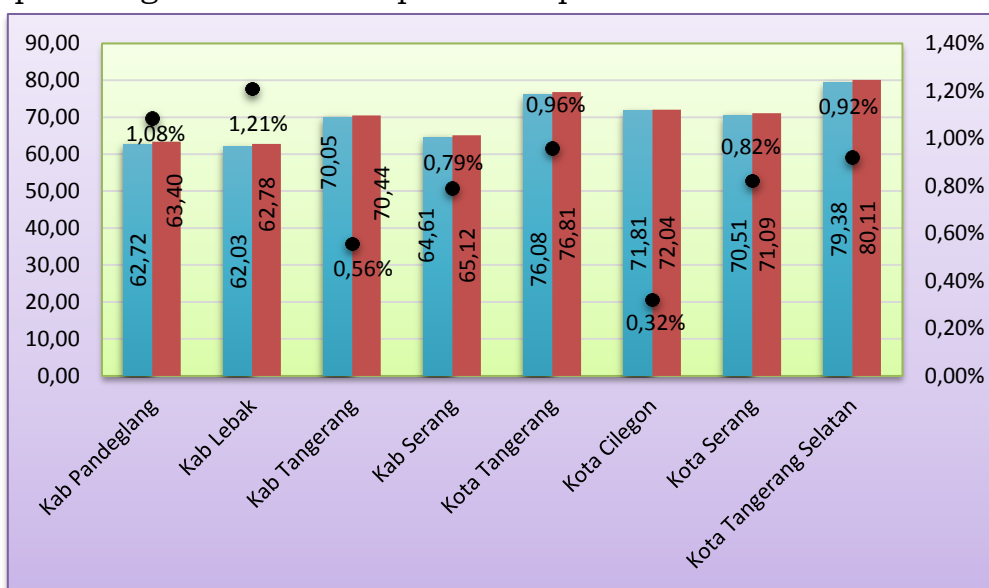
### 2.3.1 Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Sebagai alat ukur, IPM dinilai sudah cukup memadai dalam hal menggambarkan capaian pembangunan manusia, dibandingkan dengan indeks komposit lain. Perkembangan



capaian pembangunan manusia di Banten terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat diketahui dari naiknya angka IPM secara konsisten selama periode 2010-2016. Adapun besaran kenaikannya senilai 3,42 poin, yang setara dengan 0,49 poin per tahun. Angka IPM Banten pada tahun 2016 mencapai 70,96. Berarti, tingkat pencapaian pembangunan manusianya dapat dikatakan masih sekitar 71 persen dari kondisi pembangunan manusia yang ideal (IPM ideal = 100).

Perbedaan letak geografis, keberagaman potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta perbedaan dalam struktur ekonomi dan ketenagakerjaan antar daerah, akan menghasilkan capaian pembangunan manusia yang berbeda pada setiap daerah. Disamping itu, adanya perbedaan strategi dan fokus pembangunan, serta keberhasilan berbagai program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, juga menentukan tinggi rendah dan kecepatan capaian pembangunan manusia pada setiap daerah.



Sumber: IPM Provinsi Banten (2016)

Gambar 2. 4 Nilai dan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Banten, 2015-2016

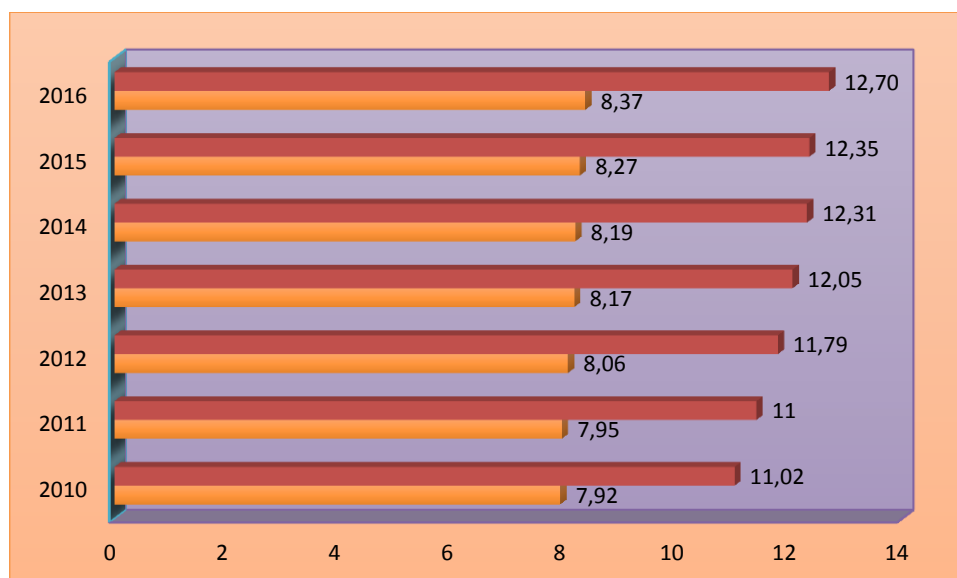
Capaian pembangunan manusia di seluruh kabupaten/kota menunjukkan adanya perbaikan. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka IPM seluruh kabupaten/kota, yaitu dari kisaran 62,03 sampai 79,38 di tahun 2015 menjadi 62,78 sampai 80,11 pada tahun 2016 (Gambar 2.4). Dari sisi status pembangunan manusia, juga terlihat ada peningkatan. Pada tahun 2015, angka IPM Kota Tangerang Selatan masih berada di bawah 80. Namun pada tahun 2016 ini meningkat hingga mencapai 80,11. Oleh

karena itu, status pembangunan manusianya juga meningkat menjadi “Sangat Tinggi” ( $IPM \geq 80$ ).

### 2.3.2 Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Pendidikan meningkatkan kualitas atau kemampuan diri seseorang, sesuai dengan potensinya masing-masing. Kemampuan diri inilah yang digunakan oleh manusia yang berpendidikan, untuk lebih memperhatikan kualitas hidupnya agar dapat hidup lebih lama. Tidak hanya itu, dengan kemampuan diri yang meningkat, manusia yang berpendidikan akan berpeluang besar untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih layak. Oleh karena itu, pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas manusia, agar semakin terbuka peluang bagi mereka. Dengan kata lain, pendidikan memperluas peluang atau pilihan seseorang.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dan semakin terbukanya kesempatan dalam pendidikan ini, pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Keberhasilannya itu, jelas memerlukan dukungan yang kuat dari seluruh elemen masyarakat. Sementara tingkat keberhasilannya, dapat diketahui dari indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Kedua indikator pendidikan di atas, juga digunakan dalam pengukuran capaian pembangunan manusia, untuk mewakili dimensi pengetahuan. Dengan demikian, ada kesesuaian antara program pemerintah dengan pembangunan manusia.



Sumber: Banten Dalam Angka 2017

Gambar 2.5 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Banten, 2010-2016 (tahun)

RLS Banten sendiri selama periode 2010-2016 terus mengalami peningkatan (Gambar 4.3). Peningkatannya ini jelas menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk Banten secara rata-rata telah meningkat. Dengan demikian, semakin terbuka peluang bagi penduduk Banten untuk lebih meningkatkan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraannya. Betapapun juga, peningkatan kualitas pendidikan penduduk Banten terasa sangat lambat. Pada tahun 2010, rata-rata penduduk Banten berusia 25 tahun ke atas, bersekolah hingga kelas 2 SMP. Enam tahun kemudian, rata-rata lama sekolahnya hanya bertambah satu tahun menjadi kelas 3 SMP (belum tamat). Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah ini masih di atas nasional yang hanya sampai kelas 2 SMP.

Meningkatnya HLS Banten juga mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan penduduk Banten pada masa mendatang akan semakin meningkat. Hal ini karena HLS menggambarkan rata-rata lama sekolah yang dapat ditempuh oleh penduduk usia 7 tahun selama masa hidupnya. HLS nya sendiri mencapai 12,70 tahun, yang setara dengan kuliah sampai Semester I. Sementara pada saat yang bersamaan, penduduk Indonesia umumnya bersekolah hingga sebulan lebih lama. Dengan demikian, meskipun sistem pendidikan di Banten sudah berjalan pada arah yang benar, namun tetap harus diperbaiki agar dapat mengejar ketertinggalannya.

Pada grafik tergambar rata-rata lama sekolah di wilayah kabupaten masih dibawah rata-rata lama sekolah di wilayah perkotaan, terutama di Kab. Lebak dan Pandeglang. Perbaikan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah tidak terlepas dari pendidikan yang merupakan penentu kualitas penduduk. Kualitas penduduk Banten sendiri selama tiga tahun terakhir ini telah meningkat pesat. Kondisi ini dapat diketahui dari meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas (RLS) dan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan S1/DIV/S2/S3 (APT), hingga mencapai

8,37 tahun dan 6,39 persen. Bahkan, kualitas penduduk Banten ini secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan Nasional, yang memiliki RLS dan APT hanya 7,95 tahun dan 5,96 persen.

Tabel 2.2 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota 2012 – 2016

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Kab Pandeglang	6,43	6,44	6,45	6,60	6,62
Kab Lebak	5,70	5,81	5,84	5,86	6,19
Kab Tangerang	8,07	8,18	8,20	8,22	8,23
Kab Serang	6,57	6,65	6,69	6,90	6,98
Kota Tangerang	9,76	9,82	10,2	10,20	10,28
Kota Cilegon	9,29	9,6	9,66	9,67	9,68
Kota Serang	8,48	8,56	8,58	8,59	8,60
Kota Tangerang Selatan	11,09	11,48	11,5	11,57	11,58
Sum Provinsi Banten	8,06	8,17	8,19	8,27	8,37

ber : SIPD Provinsi Banten

Rata rata lama sekolah Provinsi Banten pada tahun 2012 adalah 8.06, angka pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 31 poin atau 8,37. Selama periode 2012 hingga 2016, Harapan Lama Sekolah telah meningkat sebesar 0,31 tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah juga menjadi sinyal bahwa memang ada perbaikan pada sistem pendidikan di Banten. Kondisi ini sekaligus menjadi penanda dari semakin banyaknya penduduk yang bersekolah. Sayangnya, angka pertumbuhan Harapan Lama Sekolah dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, inilah yang harus dicari jalan keluarnya. Betapapun juga, Harapan Lama Sekolah pada tahun 2016 telah mencapai 12,70 tahun. Artinya, bahwa anak-anak yang telah berusia 7 tahun pada tahun 2015, memiliki peluang untuk bersekolah hingga Semester I di perguruan tinggi, atau setidaknya menamatkan pendidikan hingga lulus SMA.

Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah di Banten pada tahun 2016 telah mencapai 8,37 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III). Selain itu, angka pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah yang selalu positif, menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk Banten terus mengalami peningkatan. Bahkan dalam setahun terakhir ini, kualitas pendidikan penduduk Banten meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya.

### 2.3.3 Angka Partisipasi Pendidikan

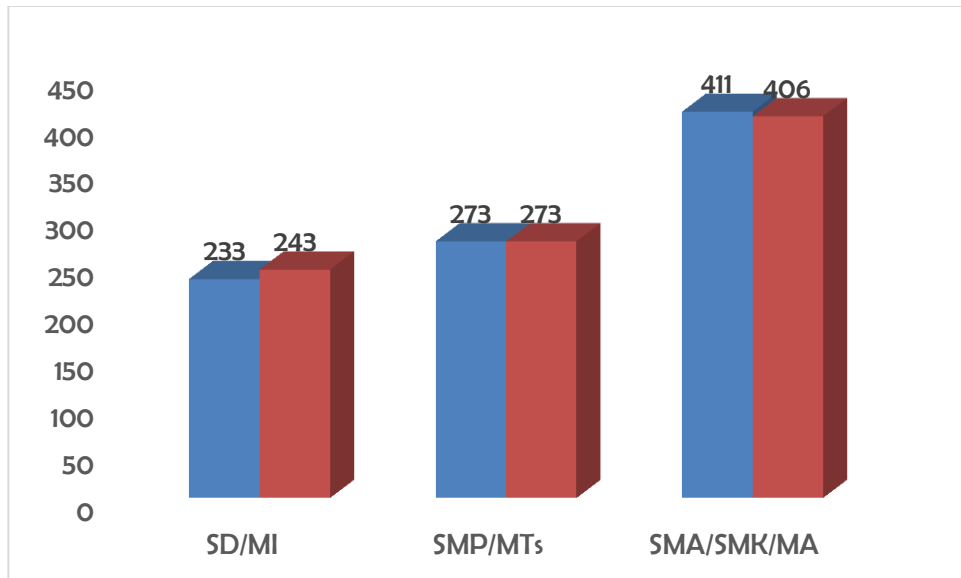
Kualitas penduduk Banten yang meningkat ternyata didorong oleh semakin luasnya akses penduduk terhadap pendidikan. Hal ini ditandai oleh angka partisipasi sekolah (APS) untuk berbagai kelompok usia yang terus mengalami peningkatan. Namun demikian, masih rendahnya APS kelompok usia 16-18 tahun, harus mendapat perhatian lebih dari semua pihak. Hal ini karena dengan nilai APS yang hanya 67 persen, berarti ada sekitar sepertiga penduduk usia 16-18 tahun, yang pada tahun 2016 tidak bersekolah lagi.

Tabel 2.3 Angka Partisipasi Sekolah Banten 2014 - 2016

Tahun	Usia 7 - 12 Tahun	Usia 13 - 15 Tahun	Usia 16 - 18 Tahun
2014	99,29	94,87	66,25
2015	99,41	95,29	66,73
2016	99,43	95,59	67,00

Sumber: Statistik Daerah Provinsi Banten (2017)

Kualitas pendidikan penduduk berkaitan erat dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu indikatornya adalah rasio ketersediaan sekolah (RKS), yang dapat menggambarkan kemampuan sekolah dalam menampung penduduk usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan. Berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa SMA/SMK/MI mengalami penurunan. Berarti, ketersediaan gedung sekolahnya sudah meningkat, melebihi pertambahan penduduk usia sekolah. Adapun untuk gedung sekolah SD/MI, peningkatannya masih sedikit di bawah pertambahan penduduk usia sekolahnya.



Sumber: Statistik Daerah Provinsi Banten (2017)

Gambar 2.6 Rasio Ketersediaan Sekolah di Banten

## 2.4 Aspek Kesehatan

### 2.4.1 Angka Harapan Hidup

Hidup lebih lama merupakan dambaan setiap orang. Untuk dapat berumur panjang, diperlukan kondisi kesehatan yang lebih baik. Di sisi lain, tujuan pembangunan manusia yaitu memperluas pilihan-pilihan bagi manusia, yang untuk memperoleh atau memanfaatkannya diperlukan umur panjang dan sehat. Dimensi umur panjang dan sehat ini, dalam pembangunan manusia diproksi dengan indikator angka harapan hidup saat lahir (AHH).

AHH sendiri adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Dengan demikian, AHH juga dapat menggambarkan derajat kesehatan yang telah dicapai oleh seseorang atau masyarakat. Semakin tinggi derajat kesehatannya, maka kesempatan untuk bertahan hidup akan semakin besar. Sebaliknya, tingkat kesehatan yang buruk akan cenderung memperpendek usia hidup. Capaian Banten untuk bidang kesehatan dalam tiga tahun terakhir telah menunjukkan adanya perbaikan. Kondisi ini terlihat dari terus meningkatnya Angka harapan hidup (AHH) hingga mencapai 69 tahun lebih 5 bulan pada tahun 2016. Selain itu, angka kesakitan yang diukur dengan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan menurun hingga menjadi 28,30 persen. Sayangnya, rata-rata

lama sakit dari penduduk yang mengalami keluhan kesehatan justru meningkat dari sekitar 5 hari menjadi 6 hari.

Tabel 2.4 Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Banten 2010 - 2016

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kab Pandeglang	62,26	62,46	62,66	62,83	62,91	63,51	63,77
Kab Lebak	65,49	65,63	65,74	65,83	65,88	66,28	66,43
Kab Tangerang	68,79	68,86	68,92	68,96	68,98	69,28	69,37
Kab Serang	62,56	62,75	62,90	63,03	63,09	63,59	63,81
Kota Tangerang	71,07	71,08	71,09	71,09	71,09	71,29	71,34
Kota Cilegon	65,72	65,78	65,84	65,84	65,85	66,15	66,24
Kota Serang	67,20	67,22	67,23	67,23	67,23	67,33	67,36
Kota Tangerang Selatan	72,04	72,07	72,09	72,10	72,11	72,12	72,14
Banten	68,50	68,68	68,86	69,04	69,13	69,43	69,46

Sumber: BPS Banten (2017), [www.bpsbanten.go.id](http://www.bpsbanten.go.id)

Angka harapan hidup menurut kabupaten/kota di Banten menunjukkan bahwa capaian pembangunan kesehatan beberapa masih belum optimal dari 2010 - 2016, karena capaiannya berada di bawah rata-rata Banten. Adapun daerah tersebut adalah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon. Pada 2016, angka harapan hidup yang paling tinggi adalah Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang, yakni masing-masing 71,14 dan 71,34 tahun.

#### 2.4.2 Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

Adanya perbaikan capaian dalam bidang kesehatan disebabkan oleh bertambahnya pemahaman penduduk akan arti penting kesehatan. Kondisi ini dapat diketahui dengan melihat bahwa klinik/praktik dokter/bidan serta puskesmas/pustu masih menjadi tempat berobat jalan utama bagi penduduk yang mengalami keluhan kesehatan.

Tabel 2.5 Jumlah Rumah Sakit Menurut Kab./Kota se Provinsi Banten Tahun 2013 - 2016

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Sakit			
		2013	2014	2015	2016
1	Pandeglang	1	1	2	2
2	Lebak	3	3	3	3
3	Tangerang	18	20	20	22
4	Serang	2	2	3	3
5	Tangerang	20	29	29	32
6	Cilegon	5	5	6	6
7	Serang	6	6	6	8
8	Tangerang Selatan	23	27	28	29
	Jumlah	78	93	97	105

Sumber : SIPD Provinsi Banten (2016),

## Banten Dalam Angka (2017)

Tingginya pemahaman penduduk Banten akan arti penting kesehatan, terutama karena mereka sering berinteraksi dengan petugas kesehatan dan difasilitasi oleh berbagai sarana kesehatan yang semakin bertambah banyak. Tercatat, jumlah sarana kesehatan berupa rumah sakit dan puskesmas pada tahun 2016 masing-masing sebanyak 95 unit dan 233 unit. Kedua sarana kesehatan tersebut secara total didukung oleh 4.760 dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis, serta 5.404 bidan dan 8.973 perawat.

Tabel 2.6 Data Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Posyandu, Klinik Swasta  
Tahun 2016

NO	KAB/KOTA	PEMERINTAH		SWASTA	MASYARAKAT		
		Puskesmas	Pustu	Klinik Swasta	Poskesdes	Posyandu	Poskestren
1	Kab Lebak	42	69	35	63	1.958	16
2	Kab Pandeglang	36	57	24	37	1.795	17
3	Kab Serang	31	49	91	34	1.529	33
4	Kab Tangerang	44	48	396	55	2.160	23
5	Kota Cilegon	8	10	64	15	368	5
6	Kota Serang	16	13	79	17	610	15
7	Kota Tangerang	33	6	54		1.076	1
8	Kota Tangerang Selatan	26	14	215	20	821	2
BANTEN		236	266	958	241	10.317	112

Sumber : SIPD Provinsi Banten (2016), Banten Dalam Angka (2017)

Dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, menyebutkan bahwa masih terdapat ketimpangan Aksesibilitas Kesehatan. Ketersediaan rumah sakit dibandingkan dengan jumlah penduduk jumlahnya sangat kecil pada Kabupaten Tangerang dan Serang dibandingkan rata-rata ketersediaan rumah sakit di propinsi Banten. Khususnya di Kabupaten Tangerang kebutuhan puskesmas tiap 100.000 penduduk masih perlu ditingkatkan.

Tabel 2.7 Fasilitas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2015

Kabupaten/ Kota	Rumah Sakit	Puskesmas	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk - Jumlah Rumah Sakit	Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk
Kabupaten Pandeglang	2	36	1.194.911	597.456	3,01
Lebak	18	42	1.269.812	70.545	3,31
Tangerang	3	43	3.370.594	1.123.531	1,28
Serang	1	31	1.474.301	1.474.301	2,10



Kota					
Tangerang	20	32	2.047.105	102.355	1,56
Cilegon	5	8	412.106	82.421	1,94
Serang	6	16	643.205	107.201	2,49
Tangerang Selatan	23	25	1.543.209	67.096	1,62
Provinsi Banten	78	233	11.955.243	153.272	1,95

Sumber: SIPD Banten (2016)

Selain jumlah prasarana kesehatan per 1000 penduduk, indikator keteringgalan dari Kabupaten Lebak dan Pandeglang juga pada indikator Jumlah Tenaga Kesehatan Provinsi Banten. Berikut ini data jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Banten.

Tabel 2.8 Tabel Jumlah Tenaga Kesehatan Provinsi Banten

Kabupaten/Kota	Tenaga Kesehatan				
	Tenaga Medical	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Lainnya
<u>Kabupaten</u>					
Pandeglang	17	57	58	3	81
Lebak	95	555	860	33	77
Tangerang	97	219	146	17	93
Serang	192	411	684	47	56
<u>Kota</u>					
Tangerang	199	291	168	65	107
Cilegon	22	144	112	10	36
Serang	57	186	307	27	32
Tangerang Selatan	240	366	278	66	496
Provinsi Banten	919	2 229	2 613	268	978

Sumber: Banten Dalam Angka (2017)

## 2.5 Aspek Ekonomi

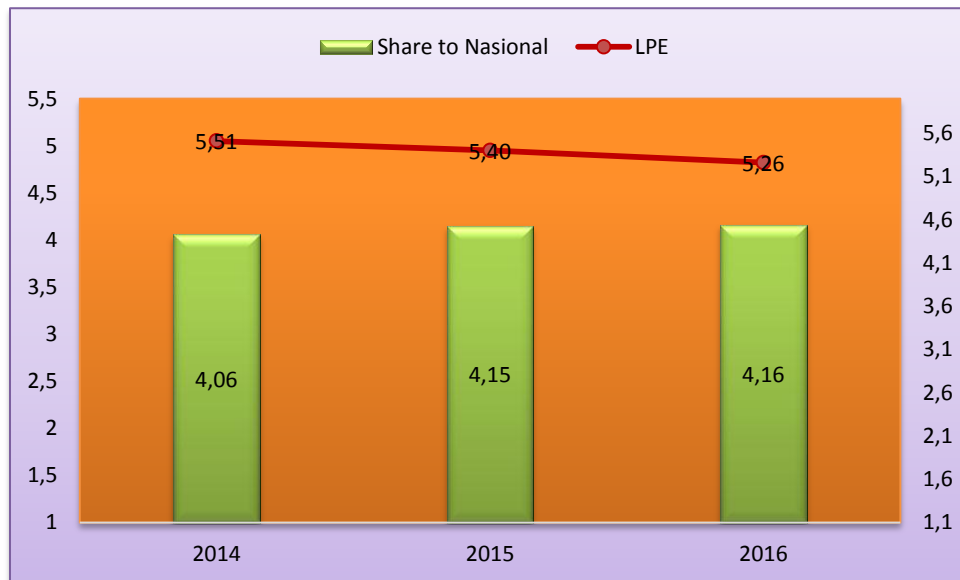
Perekonomian Banten selama 2016 menghadapi tekanan yang cukup berat. Tekanan tersebut bersumber dari sisi eksternal, yakni adanya ketidakpastian ekonomi global, meskipun telah mulai ke arah yang stabil. Hal ini ditandai dengan naiknya ekspor dari US \$ 9,05 miliar pada 2015 menjadi US \$ 9,33 miliar pada 2016. Sementara disisi lain, impor luar negeri mengalami penurunan US \$ 1,33 miliar, hingga menjadi US \$ 8,52 miliar, akibatnya neraca perdagangan Banten mengalami surplus US \$ 805 juta (BPS Banten, 2016). Sumber tekanan lain adalah pemangkasan anggaran belanja oleh

pemerintah pusat hingga mencapai Rp 133,8 triliun, akibatnya memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Namun disatu sisi, terdapat peluang perbaikan kondisi ekonomi dengan meingkatnya realisasi PMA selama 2016. BKPM mencatat bahwa PMA di Banten mengalami peningkatan dari US \$ 2,54 miliar menjadi US \$ 2,91 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan PMDN juga mengalami peningkatan dari Rp 10,71 triliun menjadi Rp 12,43 triliun.

### 2.5.1 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Banten selama tahun 2016 ini menghadapi tekanan yang cukup berat, terutama akibat masih adanya ketidakpastian kondisi ekonomi global. Beruntung, sejak Semester II, kondisinya mulai stabil dan bagi negara-negara mitra dagang utama Banten, malahan cenderung untuk membaik. Akibatnya, meskipun ekonomi Banten tumbuh melambat, namun angkanya masih berada pada level 5,26 persen. Bahkan, angka pertumbuhan ini masih di atas Nasional yang tumbuh hanya 5,02 persen. Oleh karena itu, share ekonomi Banten terhadap Nasional bertambah menjadi 4,16 persen.

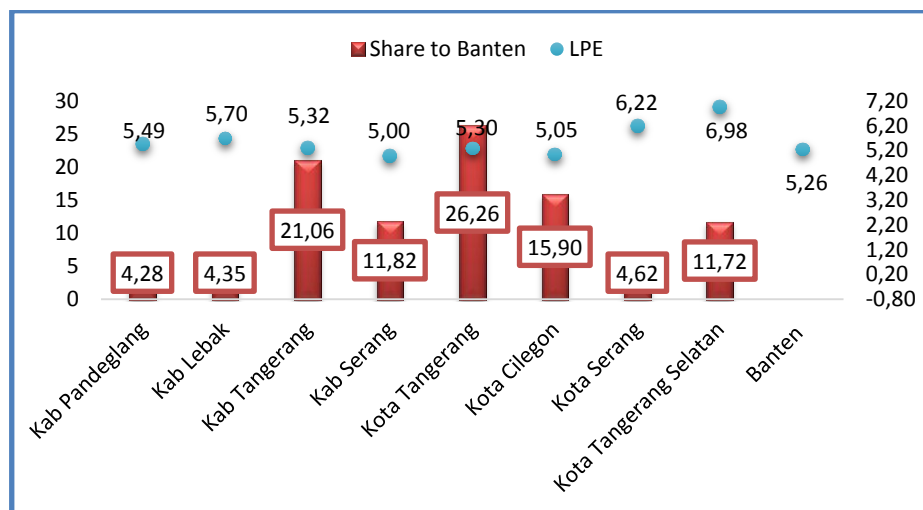


Sumber: Statistik Daerah Banten (2017)

Gambar 2.7 LPE dan Share PDRB Banten (persen)

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Banten tahun 2016 itu, secara spasial disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi pada hampir semua kabupaten/kota

yang ada. Dalam hal ini, terutama adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Kondisi yang demikian dapat terjadi karena share keduanya dalam perekonomian Banten sangat dominan, yakni mencapai 47,32 persen.



Sumber: Statistik Daerah Banten (2017)

Gambar 2.8 LPE Kabupaten/Kota dan *Share to Banten* 2016

Sementara itu membaiknya kondisi ekonomi global pada Semester I-2017, jadi pendorong naiknya ekspor Banten, Hanya saja, impor juga meningkat dengan besaran yang lebih tinggi, sehingga mengurangi surplus perdagangan luar negeri Banten. Beruntung, permintaan domestik dan nasional masih menguat, sehingga ekonomi Banten mampu tumbuh 5,73 persen. Bahkan, angka pertumbuhan ini menjadi yang tertinggi dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya. Disamping itu, juga lebih cepat dari angka pertumbuhan Nasional yang hanya sebesar 5,01 persen.

Tabel 2.9 Indikator PDRB Banten Semester I-2017

Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Share	LPE	Kontribusi
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,40	11,54	0,66
Industri Pengolahan	32,33	4,11	1,48
Konstruksi	9,91	6,41	0,58
Perdagangan Besar, Eceran, dan Reparasi Mobil – Motor	12,17	5,57	0,74
Transportasi dan Pergudangan	10,45	7,12	0,46
Informasi dan Komunikasi	3,69	8,06	0,45
Real Estate	7,39	6,93	0,57
Jasa Pendidikan	3,22	6,53	0,19
Lainnya	14,14	4,71	0,60
<b>PDRB</b>	<b>100</b>	<b>5,73</b>	<b>5,73</b>

Sumber: Statistik Daerah Banten (2017)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banten 2016 dari sisi *supply* mencerminkan besaran nilai tambah bruto yang tercipta sebagai akibat proses produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh berbagai unit produksi yang ada di suatu wilayah. Dalam jangka pendek, *supply* ada untuk memenuhi *demand*. Oleh karena itu, PDRB dari sisi *demand* adalah jumlah permintaan akhir yang dilakukan oleh berbagai pelaku ekonomi yang ada di suatu wilayah. Bila *supply* berlebih, kelebihannya itu digunakan untuk memenuhi permintaan luar daerah/luar negeri. Sebaliknya bila kurang, akan dipenuhi melalui impor antar daerah/luar negeri.

Pertumbuhan ekonomi Banten sendiri pada Semester I-2017 yang mencapai 5,73 persen, dari sisi *supply*, terutama didukung oleh pertumbuhan pada lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-motor. Kedua lapangan usaha ini masing-masing memberikan andil 1,48 persen poin dan 0,74 persen poin.

Tabel 2.10 Indikator PDRB Banten Semester I-2017  
Menurut Pengeluaran (persen)

Komponen Pengeluaran	Share	LPE	Kontribusi
Konsumsi Rumah Tangga	53,15	5,37	3,14
Pengeluaran Pemerintah	3,57	2,74	0,10
PMTB	30,25	10,38	3,02
Ekspor Netto	13,03	-6,00	-0,53
- Ekspor	75,78	10,62	8,42
- Impor	62,75	12,71	8,95
PDRB	100	5,73	5,73

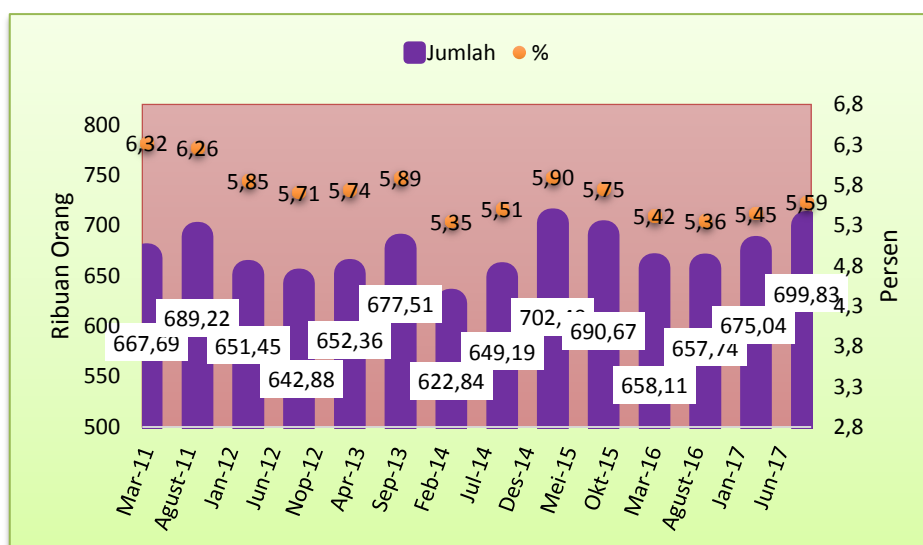
Sumber: Statistik Daerah Banten (2017)

Adapun dari sisi *demand*, didorong oleh tumbuhnya komponen konsumsi rumahtangga domestik dan komponen penambahan modal tetap bruto (PMTB), dengan andil sebesar 3,14 persen poin dan 3,02 persen poin. Sementara struktur ekonomi Banten sendiri, dari sisi *supply* didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha perdagangan besar-eceran dan reparasi mobilmotor, dengan sumbangan atau kontribusi masing-masing sebesar 32,33 persen dan 12,17 persen. Adapun dari sisi *demand*, komponen konsumsi rumahtangga dan komponen PMTB berperan besar dalam pembentukan PDRB Banten, dengan *share* mencapai 53,15 persen dan 30,25 persen.

## 2.5.2 Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.

Program pengentasan kemiskinan di Banten selama setahun terakhir ini, dapat dikatakan belum berhasil. Penilaian tersebut didasarkan kepada jumlah dan persentase penduduk miskin yang meningkat, seiring dengan naiknya garis kemiskinan. Jumlah dan persentase penduduk miskin sendiri pada Maret 2017 masing-masing mencapai 675 ribu orang dan 5,45 persen, sedangkan garis kemiskinannya sekitar 389 ribu rupiah per kapita sebulan.

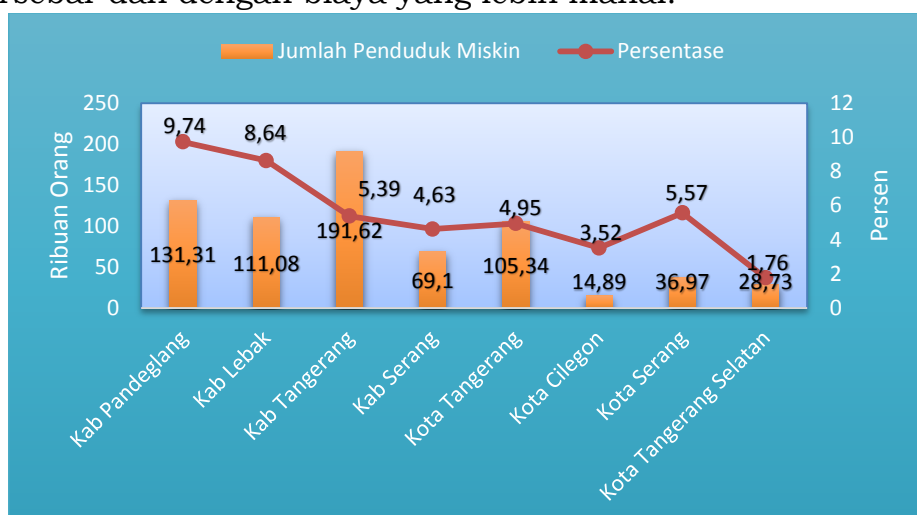


Sumber: Analisis Data Kemiskinan Banten (BPS Banten, 2017)

Gambar 2.9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Banten Maret 2011 – September 2017

Selain karena jumlah dan persentase penduduk miskin yang meningkat, indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan juga semakin membesar. Berarti, pengeluaran penduduk miskin Banten secara rata-rata memang meningkat, namun peningkatannya masih di bawah kenaikan garis kemiskinan. Imbasnya, rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan. Adapun tingkat ketimpangan pengeluaran antar sesama penduduk miskin, semakin melebar. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan

ke depannya akan lebih sulit untuk dilakukan, karena pemerintah harus menyusun program intervensi yang lebih tersebar dan dengan biaya yang lebih mahal.

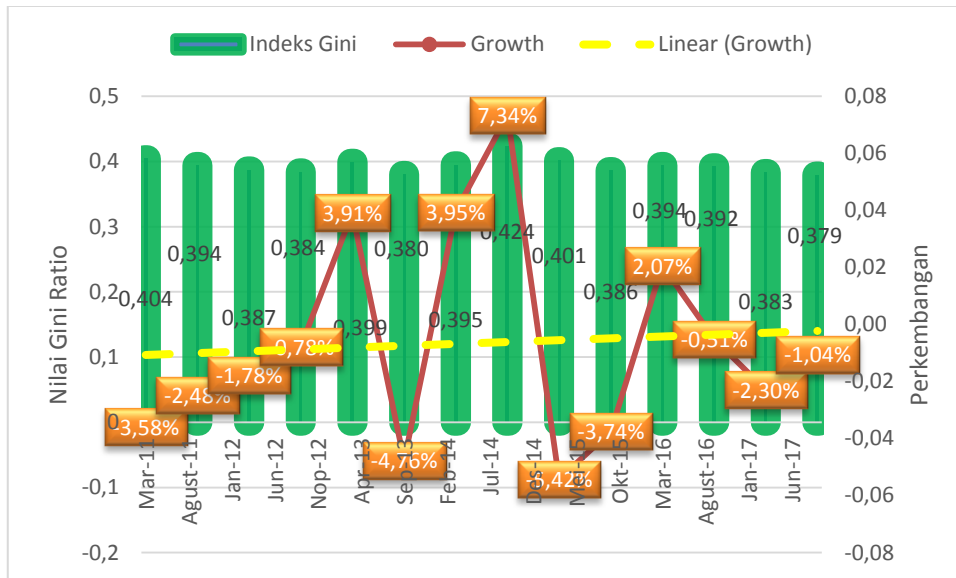


Sumber: Analisis Data Kemiskinan Banten (BPS Banten, 2017)

Gambar 2.10 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Banten September 2017

Belum berhasilnya program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan, sepertinya karena programnya masih bersifat parsial dan urban sentris. Akibatnya, insiden kemiskinan terbanyak secara historis selalu terdapat di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, yang merupakan daerah sentra pertanian Banten. Oleh karena itu, Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, dibutuhkan program yang terintegrasi dan lintas sektor, termasuk dengan melibatkan secara penuh berbagai pemangku kepentingan di bidang pertanian dalam program tersebut.

Salah satu penyebab meningkatnya kemiskinan di Banten adalah ketimpangan pendapatan sumber daya manusia yang masih rendah. Ketimpangan pendapatan dan pembangunan antar wilayah di Banten masih tinggi. Ketimpangan pendapatan antar penduduk diukur dengan indeks gini dan ketimpangan pembangunan antar wilayah diukur dengan indeks Williamson.

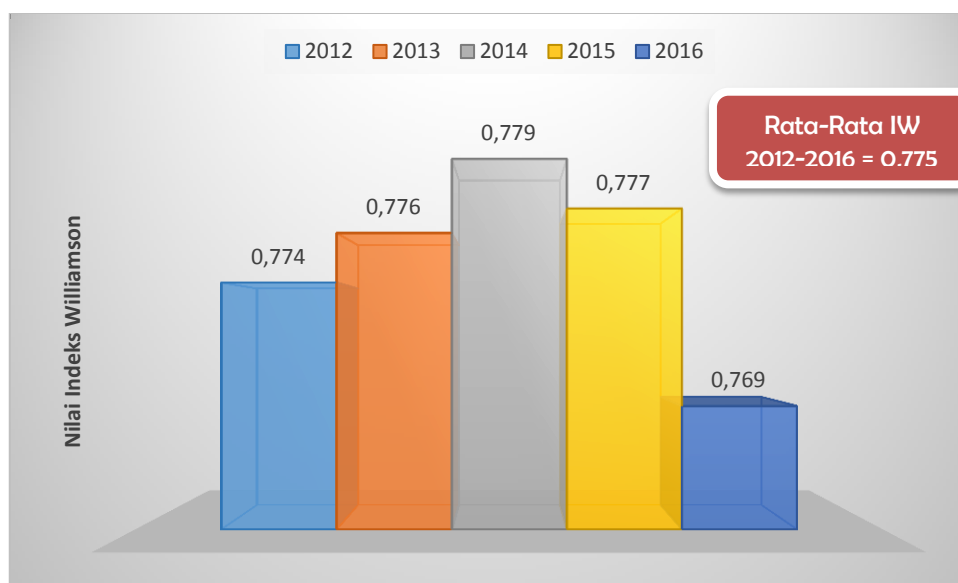


Sumber: Banten Dalam Angka (2017), data diolah

Gambar 2.11 Gini Ratio dan Perkembangannya di Banten  
Maret 2011 - September 2017

Gambar di atas menjelaskan bahwa angka ketimpangan pendapatan berkembang secara fluktuatif, namun jika dilihat dari trennya, maka ada kecenderungan meningkat secara lambat. Artinya ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk di Banten semakin besar. Meskipun Gini Ratio Banten pada September 2017 sebesar 0,379 lebih kecil 0,003 dibandingkan dengan Maret 2017 sebesar 0,383. Hal ini menunjukkan pada 2017 telah terjadi perbaikan pemerataan pendapatan penduduk Banten khususnya pada periode Maret - September 2017.

Sedangkan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Banten dengan menggunakan Indeks Williamson dalam kurun waktu 2012 – 2016 yang dihitung berdasarkan angka PDRB kabupaten/kota atas dasar harga yang berlaku menunjukkan ketimpangan antar wilayah dalam kategori tinggi karena rata-rata lebih dari 0,5 ( $IW > 0,50$ ) karena nilai rata-rata IW dalam kurun waktu tersebut  $0,775 > 0,50$ . Berikut ini disajikan perkembangan IW Banten, yaitu:



Sumber: Analisis Sosial Ekonomi Banten (BPS Banten, 2016)

Gambar 2.12 Indeks Wiliiamson Banten 2012 - 2016

Ketimpangan antar wilayah yang masih tinggi disebabkan oleh pembangunan dan karakteristik daerah di Banten yang belum merata. Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan merupakan wilayah bagian utara Banten dan menjadi daerah hinterland DKI Jakarta. Ketiga daerah ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas infrastruktur yang memadai, sehingga menjadi daya tarik bagi investor besar. Oleh karena itu, ketiga daerah ini menjadi daerah yang paling maju di wilayah Banten.

Sementara itu, di bagian selatan Banten seperti Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak adalah wilayah yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal. Fasilitas infrastrukturnya terutama jalan, jembatan, angkutan umum sangat minim, sehingga kurang menjadi daya tarik investor besar. Akibatnya, kedua daerah ini lambat perkembangannya dan memicu ketimpangan antar wilayah di Banten. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah adalah dengan memberikan insentif bagi investor yang tertarik untuk investasi di bagian selatan Banten, melakukan konservasi dan pengembangan kegiatan pertanian, serta pariwisata. Cara lain adalah memberikan dana *block grant* yang besar sebagai kompensasi kepada daerah selatan ini atas kerugian pembatasan yang diterapkan di wilayah ini.



### 2.5.3 Pertanian

Sebagai produsen beras terbesar kesebelas di Indonesia, padi menjadi tanaman yang telah ditanam di seluruh wilayah Banten, akan tetapi, sentra produksinya hanya terletak pada empat wilayah kabupaten, yaitu Pandeglang, Lebak, Serang, dan Tangerang. Produksi padi Banten sendiri pada tahun 2016 mencapai 2,36 juta ton gabah kering giling (GKG), atau naik 0,17 juta ton GKG dibandingkan tahun 2015. Kenaikan produksi padi ini disebabkan oleh luas panen yang bertambah dan produktivitas yang meningkat. Luas panen bertambah karena adanya perbaikan pada jaringan irigasi tersier, pembuatan embung, program pompanisasi dan gerakan percepatan tanam padi. Adapun produktivitas tanaman yang meningkat, selain dipengaruhi kondisi iklim, juga disebabkan oleh penerapan sistem penanaman jajar legowo serta penggunaan bibit unggul bersertifikat dan pupuk bantuan pemerintah, yang disalurkan melalui program upaya khusus.

Seperti padi, tanaman palawija juga ditanam di seluruh wilayah Banten, dengan sentra produksi terutama di Kabupaten Serang dan Pandeglang. Peningkatan/penurunan produksi tanaman ini pada umumnya disebabkan oleh penambahan/pengurangan luas panen dan produktivitas. Produksi tanaman palawija terbanyak dipegang oleh tanaman ubi kayu, sedangkan yang paling sedikit adalah tanaman kacang hijau. Adapun produktivitas tanaman tertinggi dan terendah, juga dipegang oleh keduanya, dengan tingkat produktivitas masing-masing sebanyak 202,5 kw/ha dan 8,1 kw/ha.

## 2.6 Aspek Sarana dan Prasarana

### 2.6.1 Jumlah Desa Dengan Jalan Yang Diperkeras

Layanan urusan Pekerjaan Umum dan Perhubungan meliputi layanan moda transportasi darat, laut dan udara. Pada tahun 2016, dari 757,375 km jalan provinsi di Provinsi Banten, sepanjang 420,48 km dalam kondisi baik (55,52%), kemudian 177,69 km dalam kondisi sedang (23,46), 75,58 km dalam kondisi rusak ringan (9,98%) dan 83,62 km dalam kondisi rusak

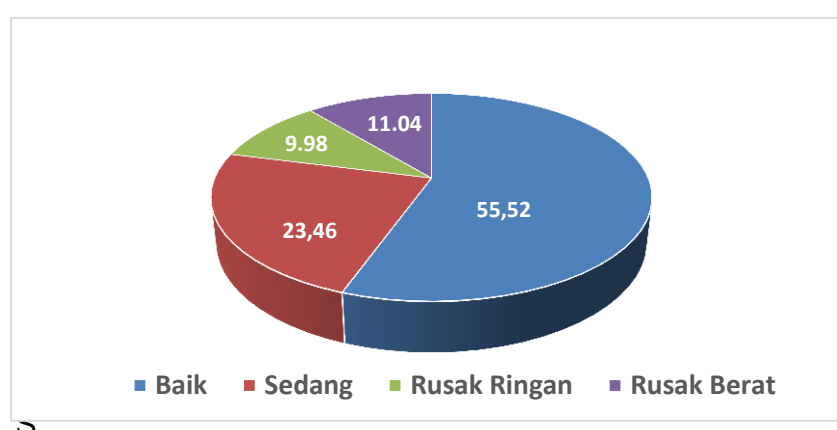
berat (11,04%). Jumlah kendaraan bermotor yang terdapat di Provinsi Banten antara lain 506.164 mobil penumpang, 7.516 bus, 152.492 truk, dan 3.933.257 sepeda motor. Penumpang domestik yang menggunakan transportasi udara pada tahun 2015 adalah sebanyak 20.802.860 orang datang dan 19.151.202 orang pergi dari bandara Soekarno-Hatta. Selain itu, tercatat juga sebanyak 1.935.806 orang transit di bandara ini. Sedangkan untuk penumpang internasional tercatat 5.997.582 orang datang, 6.354.944 orang berangkat dan 48.972 orang transit di Bandara Soekarno-Hatta pada tahun 2015. Jumlah kendaraan bermotor yang terdapat di Provinsi Banten antara lain 506.164 mobil penumpang, 7.516 bus, 152.492 truk, dan 3.933.257 sepeda motor.

Tabel 2.12 Banyaknya Desa/Kelurahan Yang Menggunakan Prasarana Transportasi Darat Menurut Jenis Permukaan Jalan Terluas

No	Kabupaten/Kota	Aspal	Diperkeras	Tanah	Lainnya
Kabupaten					
1	Pandeglang	192	131	16	-
2	Lebak	171	165	3	1
3	Tangerang	261	12	1	-
4	Serang	254	68	4	-
Kota					
1	Tangerang	103	1	-	-
2	Cilegon	43	-	-	-
3	Serang	60	6	-	-
4	Tangerang Selatan	54	-	-	-
Jumlah		1138	383	24	1

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Secara umum kondisi infrastruktur jalan di Banten sebagai media utama untuk transportasi dan akses masyarakat ke berbagai tujuan pada 2016 dapat digambarkan bahwa kondisi jalan yang masuk kategori baik adalah sebesar 55,52%. Sedangkan sisanya yakni masuk kategori rusak sedang sebesar 23,46%, rusak ringan sebesar 9,98%, dan rusak berat adalah sebesar 11,04%.



Gambar 2.7 Persentase Kondisi Jalan Provinsi Banten

Hubungan kebutuhan infrastruktur pada masyarakat bisa diukur dengan rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk. Sementara rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk (ribu jiwa) suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah ribu jiwa penduduk.

Tabel 2.13 Rasio Panjang Jalan dengan jumlah Penduduk  
(ribu jiwa/km) 2016

No	Kabupaten/Kota	Panjang Jalan (km)	Jumlah Penduduk	Rasio Panjang Jalan dengan jumlah Penduduk (ribu jiwa/km)
Kabupaten				
1	Pandeglang	283,34	1.194.911,00	4,22
2	Lebak	404,72	1.269.812,00	3,14
3	Tangerang	123,3	3.370.594,00	27,34
4	Serang	299,23	1.474.301,00	4,93
Kota				
1	Tangerang	36,77	2.047.105,00	55,67
2	Cilegon	26,89	412.106,00	15,33
3	Serang	142,37	643.205,00	4,52
4	Tangerang Selatan	57,76	1.543.209,00	26,72
Jumlah		1.329,38	11.955.243,00	8,99

Sumber: SIPD Propinsi Banten

Di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan jumlah penduduk yang per kilometer panjang jalan cukup tinggi, sehingga menimbulkan kepadatan dijalan. Di wilayah ini perlu ditingkatkan layanan panjang jalan untuk bisa menopang potensi ekonomi wilayah yang memadai.

1. Ketimpangan Kemandirian Fiskal Antar Daerah dan Wilayah.
2. Kurangnya Konektivitas Infrastruktur Kewilayahan dan Antar Wilayah.

Rasio panjang jalan terhadap luas wilayah masih dibawah 20 persen pada semua kabupaten di wilayah Propinsi Banten, berikut tabel rasio panjang jalan terhadap luas wilayah.

### 2.7.2 Presentase Keluarga Pengguna Air Bersih

Air minum bersih sendiri didefinisikan sebagai air yang bersumber dari air kemasan, air isi ulang dan air ledeng. Termasuk juga air minum bersih adalah air dari sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, yang jarak ke tempat penampungan kotoran tinja minimal 10 meter. Sementara itu sumber air minum bersih dan sanitasi layak merupakan salah satu fasilitas perumahan yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun keberadaan keduanya ternyata masih menjadi masalah yang kronis bagi sebagian penduduk Banten. Tercatat, sampai tahun 2016 ini masih ada sekitar tiga dari sepuluh rumahtangga yang belum mempunyai akses terhadap kedua fasilitas perumahan tersebut. Bahkan untuk sumber air minum bersih, persentase rumah tangga yang mampu mengaksesnya justru menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Persentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih pada 2016 adalah 68,78% atau menurun tahun sebelumnya. Selain itu, persentasenya juga lebih rendah dari rata-rata Nasional yang mencapai 70,63 persen. Jika dilihat dari persediaan air minum menurut kabupaten/kota Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak yang paling sedikit air kemasan dan air ledeng, Masyarakat di kedua kabupaten ini masih mengandalkan air sumur dan lainnya hingga di atas 50% pada tahun 2013 dan 2014.

Tabel 2.14 Jenis Air Bersih yang digunakan Tahun 2013-2014

Kabupaten/Kota	PERSENTASE AIR BERSIH YANG DIGUNAKAN											
	Air kemasan		Ledeng		Pompa		Sumur		Lainnya		Jumlah	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Kab Pandeglang	9.59	13.32	4.17	4.81	9.14	12.08	43.42	41.94	77.09	27.84	100	100
Kab Lebak	9.27	11.43	4.46	2.77	12.23	12.30	48.34	47.90	74.05	25.60	100	100
Kab Tangerang	58.65	60.48	3.09	6.77	28.26	26.24	9.87	6.51	9.99	0	100	100
Kab Serang	42.62	42.38	6.54	5.15	24.73	24.27	18.09	15	26.11	13.20	100	100
Kota Tangerang	68.25	73.92	8.67	5.17	22.24	20.38	0.30	0	0.85	0.53	100	100
Kota Cilegon	75.01	78.78	1.65	1.42	19.43	16.96	2.98	2.12	3.90	0.72	100	100
Kota Serang	47.01	53.51	1.21	3	38.07	30.40	10.82	10.43	13.71	2.67	100	100
Kota Tangerang Selatan	51.37	53.06	1.99	1.19	42.78	44.40	3.87	1.13	3.87	0.23	100	100
Provinsi Banten	46.89	49.82	4.52	4.54	24.95	24.18	15.97	13.91	23.63	7.55	100	100

Sumber SIPD Provinsi Banten

Ketersediaan sanitasi yang layak merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya peningkatan kesehatan diri dan lingkungan. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal ini adalah ketersediaan tempat buang air besar sendiri. Selain itu, ada pula akses terhadap sanitasi layak, yang didefinisikan sebagai rumahtangga yang memiliki fasilitas buang air besar

sendiri dan bersama, menggunakan kloset leher angsa, dan menggunakan tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir kotoran atau tinja.

Tabel 2.15 Persentase Rumahtangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2015-2016

Fasilitas Perumahan	2015	2016
Air Kemasan, Air Isi Ulang, dan Ledeng (%)	51,50	51,52
Air Minum Layak (%)	69,35	68,78
Tempat Air Bersih (%)	75,00	78,63
Sanitasi Layak (%)	67,04	73,42
Penerangan Listrik (%)	99,74	99,73

Sumber: Indikator Sosial Ekonomi (BPS Banten, 2017)

Berdasarkan hasil Susenas (Tabel 2.15), terlihat bahwa sebagian besar rumahtangga di Banten sudah memiliki kesadaran terhadap kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungannya. Hal ini terlihat dari tingginya persentase rumahtangga yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar sendiri dan yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak. Bahkan, persentasenya juga lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang pada tahun 2016 masing-masing hanya sebesar 69,04 persen dan 67,80 persen.

Tabel 2.16 Penggunaan Sanitasi Rumah Tangga Tahun 2013-2014

Kabupaten/Kota	Rumah Tangga dalam Penggunaan Sanitasi								Jumlah	
	Sendiri		Bersama		Umum		Tidak Ada		2013	2014
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014		
Kab Pandeglang	46.92	51.60	4.94	4.51	4.24	2.47	43.90	41.43	100	100
Kab Lebak	50.38	52.92	4.35	6.74	2.06	1.56	43.21	38.79	100	100
Kab Tangerang	69.84	71.27	11.83	10.18	2.49	2.61	15.83	15.94	100	100
Kab Serang	48.56	56.38	6.64	7.44	3.06	0.74	41.74	35.43	100	100
Kota Tangerang	83.36	86.11	14.05	11.88	1.95	1.61	0.65	0.39	100	100
Kota Cilegon	87.87	90.04	6.87	3.76	0	0	5.26	6.19	100	100
Kota Serang	71.44	72.61	5.33	5.34	0.78	2.48	22.46	19.57	100	100
Kota Tangerang Selatan	94.29	96.77	4.71	2.92	0.50	0.31	0.50	0	100	100
Provinsi Banten	69.03	72.25	8.68	7.82	2.17	1.68	20.11	18.25	100	100

Sumber SIPD Provinsi Banten

### 2.7.3 Jumlah Pasar Tanpa Bangunan

Salah satu indikator ketertinggalan di Provinsi Banten adalah jumlah pasar tanpa bangunan. Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak masih banyak mempunyai pasar yang tanpa bangunan permanen. Pasar tanpa bangunan adalah pasar yang tidak berada dalam bangunan, termasuk pasar terapung. Berikut data jumlah desa yang mempunyai pasar di Banten.

Tabel 2.17 Jumlah Desa Yang Mempunyai Pasar di Banten

No	Kabupaten/Kota	Pasar Bangunan Permanen	Pasar Tanpa Bangunan Permanen
	Kabupaten		
1	Pandeglang	32	9
2	Lebak	43	27
3	Tangerang	59	213
4	Serang	47	69

	Kota		
5	Tangerang	34	68
6	Cilegon	5	3
7	Serang	7	4
8	Tangerang Selatan	18	45

Sumber : SPID Provinsi Banten

## 2.8 Budaya dan Pariwisata

Dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 menyebutkan bahwa salah satu sektor yang dapat diandalkan sebagai sumber devisa adalah sektor Pariwisata. Banten merupakan salah satu provinsi yang berpotensi untuk menjadi daerah utama tujuan wisata karena memiliki beragam obyek dan daya tarik wisata terutama wisata pantai, alam dan budaya serta ditunjang oleh sarana dan prasarana akomodasi yang memadai. Kegiatan pariwisata di Banten cukup potensial untuk menunjang pendapatan dan pembangunan daerah.

Dengan mempunyai garis pantai yang panjang, Provinsi Banten mempunyai potensi wisata pantai dan laut yang dapat dikembangkan dengan berbagai jenis objek wisata. Provinsi Banten juga mempunyai banyak situs bersejarah, terutama situs dan peninggalan sejarah Islam di Indonesia. Pada tahun 2015 terdapat 311 hotel (berbintang dan nonbintang) di Provinsi Banten yang menyediakan 10.681 kamar dan 16.057 tempat tidur. Hotel tersebut digunakan oleh tamu asing maupun tamu domestik dengan rata-rata lama menginap selama 2,03 hari untuk tamu asing dan 1,70 hari untuk tamu domestik. Sementara itu, tingkat penghunian kamar hotel selama tahun 2015 adalah 52,87 persen untuk hotel berbintang dan 36,83 persen untuk hotel nonbintang.

Tabel 2.18 Statistik Perhotelan di Provinsi Banten Tahun 2010-2014

Jenis Tamu	Banyaknya Tamu Hotel (Ribu Jiwa)				
	2010	2011	2012	2013	2014
Tamu Asing	54.85	78.07	100.69	359.61	175.94
Tamu Indonesia	1.096	1.431.24	1.339.92	2.976.69	1.627.93
Tamu Asing dan Indonesia	1.150.85	1.509.30	1.440.61	3.336.30	1.803.87

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Pada tahun 2015, di Provinsi Banten terdapat 138 lokasi wisata tirta, 86 wisata marina pantai, 79 wisata sejarah, 6 suaka alam dan 147 wisata lainnya. Selain itu terdapat 4 museum, 26 situs purbakala, 120 bangunan bersejarah dan 232 makam sejarah. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pariwisata, sepanjang

tahun 2015 terdapat 14.243.949 wisatawan yang mengunjungi lokasi wisata di Provinsi Banten, yang terdiri dari 14.118.787 wisatawan nusantara dan 125.162 wisatawan mancanegara.

Tabel 2.19 Jumlah Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (orang), 2015

No	Kabupaten/Kota	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Mancanegara	Jumlah
1	Kab Pandeglang	3 146 761	4 139	3 150 900
2	Kab Lebak	54 724	193	54 917
3	Kab Tangerang	51 461	29 163	80 624
4	Kab Serang	10 063 535	-	10 063 535
5	Kota Tangerang	237 263	27 697	264 960
6	Kota Cilegon	103 263	39 598	143 265
7	Kota Seraang	205 423	490	205 913
8	Kota Tangerang Selatan	255 953	23 882	279 835
	Banten	14 118 787	125 162	14 243 949

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.20 Jumlah Objek Wisata Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Wisata di Provinsi Banten, 2015

No	Kabupaten/Kota	Wisatawan Marina Pantai	Wisata Sejarah	Suaka Alam	Objek Wisata Lainnya	Jumlah
1	Kab Pandeglang	19	20	2	47	88
2	Kab Lebak	11	16	1	18	46
3	Kab Tangerang	7	14	-	34	55
4	Kab Serang	36	3	2	37	78
5	Kota Tangerang	-	9	-	3	12
6	Kota Cilegon	10	14	-	6	30
7	Kota Seraang	3	2	1	-	6
8	Kota Tangerang Selatan	-	1	-	2	3
	Banten	86	79	6	147	318

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Berdasarkan data jumlah data objek wisata menurut kabupaten/kota dan jenis wisata di Provinsi Banten, wilayah yang mempunyai objek wisata terbanyak adalah Kabupaten Pandeglang. Hal ini merupakan potensi yang baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk menciptakan inovasi di sektor pariwisata dan budaya di Kabupaten Pandeglang, hal ini dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal.

## 2.9 Pertanian

Berdasarkan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, Provinsi Banten merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Tanaman pangan dan palawija merupakan salah satu bidang yang sangat strategis dan berkembang dengan baik.

Komoditas utama tanaman pangan yang dikembangkan di Provinsi Banten terdiri dari padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, dengan tingkat produksi sebagai berikut:

Tabel 2.21 Produksi Tanaman Pangan di Provinsi Banten  
2012 - 2016 (Ton)

Jenis Tanaman Pangan	2015	2016
Padi		
- Luas Panen (000 hektar)	386,7	416,5
- Produksi (000 ton)	2189,0	2358,2
- Produktivitas (kw/ha)	56,61	56,63
Jagung		
- Luas Panen (000 hektar)	3,5	4,9
- Produksi (000 ton)	11,9	19,9
- Produktivitas (kw/ha)		
Kedelai		
- Luas Panen (000 hektar)	5,3	2,8
- Produksi (000 ton)	7,3	4,0
- Produktivitas (kw/ha)	3,7	14,1
Kacang Tanah		
- Luas Panen (000 hektar)	7,6	7,7
- Produksi (000 ton)	11,0	8,4
- Produktivitas (kw/ha)	14,5	10,9
Kacang Hijau		
- Luas Panen (000 hektar)	0,7	0,5
- Produksi (000 ton)	0,5	0,4
- Produktivitas (kw/ha)	8,0	8,1
Ubi Kayu		
- Luas Panen (000 hektar)	4,2	4,5
- Produksi (000 ton)	74,2	90,6
- Produktivitas (kw/ha)	202,5	177,6
Ubi Jalar		
- Luas Panen (000 hektar)	1,5	1,6
- Produksi (000 ton)	20,2	24,3
- Produktivitas (kw/ha)	132,3	156,2

*Sumber : SIPD Provinsi Banten (2017), Banten Dalam Angka (2017)*

Produksi tanaman padi Provinsi Banten meningkat pada 2015 menjadi 0,14 juta ton dibandingkan dengan 2014. Kenaikan produksi padi terus berlanjut pada 2016 yang cukup signifikan, yakni sebesar 169,236 ton. Sementara itu, produksi tanaman palawija pada tahun 2016 masing-masing adalah 19.882 ton jagung, 4.020 ton kedelai, 8.419 ton kacang tanah, 432 ton kacang hijau, 90.629 ton ubi kayu, dan 24.255 ton ubi jalar. Kenaikan produksi ini disebabkan oleh luas panen yang



bertambah dan produktivitas tanaman yang meningkat. Sebagai produsen beras terbesar kesebelas di Indonesia, padi menjadi tanaman yang telah ditanam di seluruh wilayah Banten. Akan tetapi, sentra produksinya hanya terletak pada empat wilayah kabupaten, yaitu Pandeglang, Lebak, Serang, dan Tangerang. Sedangkan produksi beras Banten pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 1,33 juta ton, padahal konsumsi penduduknya 1,39 juta ton setahun

Peningkatan luas panen disebabkan oleh adanya perbaikan pada jaringan irigasi tersier, pembuatan embung dan program pompanisasi. Adapun produktivitas tanaman yang meningkat, selain dipengaruhi oleh kondisi iklim, juga disebabkan oleh penerapan sistem penanaman jajar legowo serta penggunaan bibit unggul bersertifikat dan pupuk bantuan pemerintah, antara lain melalui program upaya khusus. Seperti padi, tanaman palawija juga ditanam di seluruh wilayah Banten, dengan sentra produksi terutama di Kabupaten Serang dan Pandeglang.

Potensi sektor pertanian tanaman pangan sebagian besar produksinya berada di wilayah daerah tertinggal di Provinsi Banten, yaitu di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Hal ini harus mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk ditemukan inovasi pengembangan sektor pertanian tanaman pangan di kedua wilayah ini. Mengingat di kedua wilayah ini sumber daya manusia masih menjadi indikator ketertinggalan. Berikut data penggunaan lahan tanaman pangan di Provinsi Banten.

Tabel 2.22 Penggunaan Lahan Sawah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pengairan di Provinsi Banten (hektar) 2016

No	Kabupaten/ Kota	Irigasi	Non Irigasi	Jumlah
<b>Kabupaten</b>				
1	Pandeglang	22.674	32.094	54.768
2	Lebak	25.909	28.037	53.946
3	Tangerang	24.805	12.268	37.073
4	Serang	27.516	20.495	48.011
<b>Kota</b>				
1	Tangerang	506	200	706
2	Cilegon	-	1.611	1.611
3	Serang	4.993	3.332	8.325
4	Tangerang Selatan	-	99	99
<b>Provinsi Banten</b>		<b>103.767</b>	<b>97.503</b>	<b>201.27</b>

Sumber : Banten Dalam Angka (2017)

Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak

dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/ menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperoleh atau status lahan tersebut. Lahan yang dimaksud termasuk lahan yang terdaftar di Pajak Bumi Bangunan, Iuran Pembangunan Daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa yang ditanami padi dan lahan bekas tanaman tahunan yang telah dijadikan sawah, baik yang ditanami padi, palawija atau tanaman semusim lainnya. Lahan sawah yang memiliki irigasi paling tinggi adalah di Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, yakni masing-masing 27.516 ha, 25.909 ha, dan 24.805 ha. Sedangkan non irigasi yang paling luas adalah terdapat di Kabupaten Pandeglang, yakni 32.094 ha dan Kabupaten Lebak seluas 28.037 ha.

Selain produksi padi dan palawija, juga terdapat produksi sayur-sayuran yang menunjukkan peningkatan yang cepat terutama sayuran dataran rendah, dengan komoditas andalannya jamur, petai, kacang panjang dan cabe besar. Produktivitas tanaman sayuran yang paling tinggi untuk bawang merah adalah Kabupaten Serang sebesar 64,45 kw/ha, cabai adalah Kabupaten Lebak sebesar 168,38 kw/ha, dan Petai sebesar 88,50 kw/ha di Kabupaten Lebak.

Tabel 2.23 Produktivitas Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Sayuran di Provinsi Banten, 2015 (kuintal/Hektar)

No	Kabupaten/Kota	Bawang Merah	Cabai	Petai
Kabupaten:				
1	Pandeglang	41,86	83,04	25,96
2	Lebak	45,33	168,38	88,50
3	Tangerang	44,75	63,46	40,53
4	Serang	64,45	92,31	63,96
Kota:				
1	Tangerang			173,34
2	Cilegon		84,00	70,00
3	Serang	7,00	6,27	2,20
4	Tangerang Selatan		13,69	33,68
Provinsi Banten		61,31	93,13	83,35

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Perbedaan keunggulan baik secara komparatif (*comparative advantages*) maupun keunggulan secara kompetitif (*competitive advantages*) dari masing-masing daerah di Provinsi Banten menunjukkan suatu ciri dan jatidiri dari daerah tersebut. Bagi daerah yang mempunyai potensi dan keunggulan pada sektor

pertanian, identik atau biasa disebut dengan nama daerah pinggiran (*periphery area*), sedangkan daerah yang mempunyai ciri kekotaan, yang mengandalkan keunggulannya pada sektor industri dan perdagangan biasa disebut dengan daerah pusat (*core area*). Perbedaan potensi dan masalah komoditas pertanian unggulan di setiap wilayah mengakibatkan terbentuknya pola aliran komoditas (*commodity flows*) yang memperlihatkan adanya hubungan keterkaitan antar wilayah. Dalam hal ini hubungan koleksi dan distribusi komoditas pertanian unggulan, di suatu wilayah ada yang menjadi daerah pemasaran dan sekaligus juga sebagai daerah produksi, ataupun salah satu diantaranya.

Selain padi, Banten juga memiliki komoditas tanaman unggulan lain, yaitu tanaman anggrek dengan tingkat produksi tertinggi di Indonesia. Sentra produksinya terdapat di Kota Tangerang Selatan dan menjadi salah satu obyek wisata. Adapun jumlah produksinya mencapai 7,3 juta tangkai, naik 0,3 juta tangkai dibandingkan tahun 2015.

Tabel 2.12 Statistik Komoditas Tanaman Unggulan  
Provinsi Banten 2015 - 2016

Tanaman	Satuan	2015	2016
Anggrek	Juta tangkai	7.0	7.3
Melinjo	ton	28.520	34.875
Aren	ton	2.239	3.875
Melon	ton	1.222	2.085
Durian	ton	48.546	68.886

Sumber : Statistik Daerah Provinsi Banten (2017)

Komoditas unggulan lainnya adalah melinjo yang empingnya sudah diekspor hingga ke Timur Tengah, dengan sentra produksi terdapat di Kabupaten Pandeglang. Kemudian gula aren yang dapat dinikmati sebagai panganan camilan, dengan sentra produksi di Kabupaten Lebak. Terakhir, buah melon berkualitas ekspor dari Kota Cilegon serta buah durian asal Kabupaten Pandeglang dan Serang yang kelezatannya sudah terkenal dimana-mana. Produksi keempat komoditas unggulan ini pada tahun 2016 masing-masing sebanyak 35 ribu ton, 4 ribu ton, 2 ribu ton dan 69 ribu ton.

Banten juga menjadi produsen daging sapi terbesar keempat dan produsen daging kerbau nomor sepuluh di Indonesia. Tingkat produksi keduanya pada tahun 2016 sebanyak 40 ribu

ton dan 7 ribu ton. Sementara itu sentra produksinya, untuk daging sapi terletak di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan. Adapun daging kerbau di Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

Tabel 2.25 Produksi Daging dan Telur di Provinsi Banten (ribu ton), 2015 - 2016

Jenis	2015	2016
Daging Sapi	37,2	39,8
Daging Kerbau	6,9	7,3
Daging Ayam Ras	73,5	73,9
Telur Ayam Ras	45,9	46,5

Sumber: Statistik Daerah Provinsi Banten (2017)

Selain daging sapi dan kerbau, Banten juga menjadi produsen daging ayam ras terbesar keenam dan produsen telur ayam ras terbanyak kesembilan di Indonesia. Jumlah produksi keduanya sebanyak 74 ribu ton dan 47 ribu ton, dengan sentra produksi ada di Kabupaten dan Kota Serang serta Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.26 Produksi Daging Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Banten (Kg), 2016

No	Kabupaten/Kota	Sapi perah	Sapi Potong	Kerbau	Kambing	Domba	Babi
<u>Kabupaten</u>							
1	Pandeglang	-	352795	501194	279150	227352	-
2	Lebak	-	216053	889594	191334	227743	-
3	Tangerang	-	8745980	186681	647719	957475	181579
4	Serang	-	2940120	1377951	639274	798980	-
<u>Kota</u>							
1	Tangerang	-	14282000	18500	154000	41000	1631000
2	Cilegon	-	489562	30524	51552	23747	-
3	Serang	239	2086283	222728	101381	209280	-
4	Tangerang Selatan	-	4360396	111917	233721	16562	82728
Provinsi Banten		239	33473189	3339090	2298141	2502139	1895307

Sumber : Banten Dalam Angka (2017)

## 2.8 Keuangan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2016, realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Banten mencapai 8,66 triliun rupiah, sementara belanja daerah Pemerintah Provinsi Banten mencapai 8,92 triliun rupiah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih merupakan sumber

penerimaan rutin terbesar Pemerintah Provinsi Banten yaitu sebesar 5,46 triliun rupiah atau memberi kontribusi sekitar 63,05 persen dari total penerimaan. Untuk belanja daerah, porsi pengeluaran tertinggi digunakan untuk belanja tidak langsung yang mencapai 5,84 triliun rupiah atau 65,47 persen dari total belanja daerah, sementara sisanya sebanyak 3,09 triliun (34,53%) digunakan untuk belanja langsung.

Tabel 2.27 Rekapitulasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Banten (juta rupiah), 2013–2016

Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	+/-	Pembiayaan Daerah	SILPA
2013	6230229,8	1 5295139,15	935090,66	134714,20	1069804,86
2014	7068432,9	1 6192155,57	876277,34	1031716,86	1907994,20
2015	7328220,7	7 8084140,16	-755919,39	1885994,21	1130074,82
2016	8656395,5	0 8925813,44	-269417,94	828574,82	559156,88

Sumber: Banten Dalam Angka (2017)

Realisasi penerimaan pajak di Provinsi Banten pada tahun 2016 mencapai 32,84 triliun rupiah atau meningkat 15,46 persen dari tahun sebelumnya, dan ditargetkan mengalami peningkatan menjadi 38,65 triliun rupiah pada tahun 2017. Penerimaan pajak tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar 18,21 triliun rupiah (55,40%), PPN dan PPNBM sebesar 14,41 triliun rupiah (43,88%), serta pajak lainnya sebesar 219,85 miliar rupiah (0,67%). Sementara itu, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi Banten pada tahun 2016 mencapai 13,03 miliar rupiah.

Tabel 2.28 Rekapitulasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota (juta rupiah), 2014–2015

Kabupaten/Kota	Realisasi 2014				Realisasi 2015			
	Penerimaan	Pengeluaran	+/-	%	Penerimaan	Pengeluaran	+/-	%
Kab Pandeglang	1747029,5	1640017,3	107012,2	6,13%	2053864,86	2037028,43	16836,43	0,82%
Kab Lebak	1796231,79	1725537,97	70693,82	3,94%	2237617,20	2092695,06	144922,14	6,48%
Kab Tangerang	2012068,32	1909367,17	102701,15	5,10%	4229034,30	4179069,90	49964,4	1,18%
Kab Serang	3698374,25	3512778,49	185595,76	5,02%	2304837,74	2342220,90	-37383,16	-1,62%
Kota Tangerang	3016402,37	2656087,93	360314,44	11,95%	3379623,33	3101034,57	278588,76	8,24%
Kota Cilegon	1304405,75	1222804,82	81600,93	6,26%	1409261,80	1463977,64	-54715,84	-3,88%
Kota Serang	1024512,3	949970,16	74542,14	7,28%	1105658,80	1061917,79	43741,01	3,96%
Kota Tang. Selatan	6337396,7	6128937,57	208459,13	3,29%	2602412,23	2621240,25	-18828,02	-0,72%

Sumber: Banten Dalam Angka (2017)

Tabel di atas menjelaskan bahwa pada 2015 semua kabupaten/kota di Banten realisasi penerimaan dan pengeluaran mengalami surplus anggaran. Surplus keuangan daerah merupakan kondisi yang kurang baik. Hal ini diakibatkan terdapat beberapa

rencana untuk membiayai pengeluaran pembangunan tidak terealisasi sehingga terjadi surplus anggaran. Pada tahun tersebut surplus yang paling tinggi adalah Kota Tangerang, yaitu mencapai 11,95% dan yang paling rendah adalah Kota Tangerang Selatan, yaitu surplus 3,29.

Hal terjadi sebaliknya pada 2015, yang mana terdapat beberapa daerah yang mengalami defisit anggaran. Daerah mengalami defisit antara lain Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan, yaitu masing-masing -1,62%, -3,88%, dan -0,72%. Sementara daerah lain masih mengalami surplus, namun pada tingkat yang lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

BAB III  
PENDEKATAN, PRINSIP, DAN POLA PELAKSANAAN PERCEPATAN  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DI PROVINSI BANTEN

3.1 Pendekatan Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal STRADA  
PPDT Banten

STRADA-PPDT Banten merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah kabupaten, Instansi Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan percepatan pembangunan daerah tertinggal di wilayah Banten. Dibutuhkan beberapa pendekatan agar program percepatan pembangunan daerah tertinggal dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan, yakni yang dikemukakan berikut ini.

a. Pembangunan dari Pinggiran

Pendekatan ini menekankan pada pengembangan pusat pertumbuhan dengan menguatkan daerah penyangga (hinterland) khususnya daerah tertinggal seraya meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan sarana dan prasarana penunjang, guna mendorong pertumbuhan ekonomi baik di perkampungan (dusun), desa, kecamatan, distrik, kawasan transmigrasi, maupun di kawasan perbatasan. Pendekatan ini juga menekankan pada pemerataan pembangunan dengan tetap memperhatikan karakteristik wilayah melalui perluasan akses pelayanan dasar di daerah tertinggal, terutama bagi masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, perikanan, maupun usaha kecil dan menengah, sehingga dapat meningkatkan produksi, nilai tambah, dan pendapatan.

b. Pembangunan yang Inklusif

Pendekatan ini menekankan pada keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kaum perempuan, masyarakat miskin, dan kelompok marjinal lainnya, dalam penyelenggaraan pembangunan baik peningkatan pelayanan dasar, akses informasi, dan pasar, maupun aspek pembangunan lainnya yang berorientasi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

c. Pembangunan yang Afirmatif

Pendekatan ini menekankan pada keberpihakan terhadap daerah tertinggal, sehingga memiliki kesempatan yang lebih luas dalam hal pemetaan masalah dan potensi serta pemecahan masalah dalam bentuk realisasi pembangunan, sebagai bagian dari percepatan pembangunan daerah tertinggal yang menjadi prioritas pembangunan

nasional.

d. Interkonektivitas Wilayah dan Sektor Pembangunan

Pendekatan ini menekankan pada penyelenggaraan pembangunan terintegrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang dapat meningkatkan interkonektivitas antara pusat pertumbuhan terhadap daerah tertinggal, baik dalam bentuk akses pelayanan dasar, akses transportasi, akses informasi, akses permodalan, maupun akses pasar.

e. Membangun dengan Jaringan

Pendekatan yang menekankan pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah tertinggal secara terintegrasi dan berkesinambungan. Perwujudan dari keterlibatan tersebut adalah kemitraan, baik dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan publik, mendorong investasi berbasis potensi lokal, transfer pengetahuan, berbagi informasi dan teknologi, serta bantuan akses manajemen, permodalan, dan akses pasar.

f. Pembangunan Berwawasan Ekologis

Pendekatan yang menekankan pada kaidah pembangunan yang berkelanjutan terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dengan mempertimbangkan karakteristik ketertinggalan daerah, isu strategis, potensi, maupun kebutuhan daerah dalam kerangka percepatan pembangunan.

### 3.2. Prinsip Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

a. Berorientasi pada Masyarakat

Penyelenggaraan pembangunan daerah tertinggal diarahkan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat baik sebagai penerima manfaat sekaligus sebagai pelaku penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan sehingga diharapkan masyarakat akan menerima manfaat yang optimal dan bertanggung jawab terhadap program pembangunan daerah tertinggal.

b. Sesuai dengan Adat Istiadat dan Budaya Setempat

Penyelenggaraan pembangunan melalui program dan kegiatan pembangunan daerah tertinggal dengan tetap memperhatikan adat istiadat dan budaya yang telah berkembang sebagai suatu kearifan



lokal yang memperkaya khasanah budaya bangsa.

c. Berwawasan Lingkungan

Penyelenggaraan pembangunan harus berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, yakni melakukan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang dengan menitikberatkan pada daya dukung lingkungan, pencapaian keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi dan budaya masyarakat di daerah tertinggal.

d. Demokratis dan Berkeadilan

Penyelenggaraan pembangunan harus melibatkan masyarakat secara aktif baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pembangunan dengan tetap memperhatikan kesetaraan hak dan kewajiban. Selanjutnya, hasil pembangunan juga harus dapat dirasakan oleh semua pihak, tidak diskriminatif dari segi suku, agama, ras, dan golongan.

e. Transparan dan Akuntabel

Penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan secara terbuka mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga proses pengawasan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

### 3.3 Pola Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Percepatan pembangunan daerah tertinggal merupakan tanggung jawab seluruh elemen yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat, termasuk perguruan tinggi. Pola kebijakan tersebut merujuk pada konsepsi dari keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal, yang dikemukakan berikut ini:

a. Koordinasi

Sebagai motor penggerak percepatan pembangunan daerah tertinggal, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal harus dapat mengoordinasikan terkait sasaran, strategi, arah kebijakan, fokus, dan lokus program dan kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan kementerian/lembaga lainnya, guna terwujudnya implementasi kebijakan, program dan kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang terintegrasi dengan semangat

kebersamaan, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat di daerah tertinggal.

b. Otonomi Daerah

Semangat otonomi daerah yang diwujudkan melalui desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta otonomi desa merupakan salah satu pintu masuk bagi terciptanya percepatan pembangunan daerah tertinggal. Kebijakan percepatan pembangunan yang dilaksanakan oleh provinsi, kabupaten dan desa diharapkan dapat bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Pusat, dengan tetap mengacu pada kewenangan dan urusan masing-masing tingkat pemerintahan, sehingga tercipta implementasi program dan kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang terintegrasi dan tepat sasaran.

c. Partisipatif

Penyelenggaraan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal harus melibatkan masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, sehingga tercipta transparansi sekaligus mengawal terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Sementara itu, perguruan tinggi juga harus dapat berkontribusi baik melalui kajian, hasil penelitian lapangan, maupun transfer pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, keterlibatan swasta yaitu mendukung implementasi program dan kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal baik dari sisi pendanaan, berbagi informasi dan akses pasar, serta kontribusi lainnya yang tidak mengikat.

### 3.4 Prioritas Percepatan Pembangunan Wilayah

Sebagai pedoman dalam rangka pewujudan dari upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal, prioritas percepatan pembangunan di daerah tertinggal sangat dibutuhkan, dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017 - 2022. Adapun prioritas percepatan pembangunan per wilayah yakni yang dikemukakan sebagai berikut: (mengacu RPJMD Banten 2017 - 2022)

Tabel 3.1 Prioritas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Banten dan Nasional

Prioritas PPDT: Wilayah Jawa (RPJMN 2015 - 2019)	Prioritas PPDT: Wilayah Banten (RPJMD 2017 - 2022)
<p>1. Menjadikan daerah tertinggal menjadi salah satu lumbung pangan nasional (padi dan jagung); dan</p> <p>2. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan (perikanan tangkap dan perikanan budidaya) dan pengembangan budidaya garam.</p>	<p>1. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial;</p> <p>2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia;</p> <p>3. Peningkatan daya saing perekonomian;</p> <p>4. Peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah;</p> <p>5. Pengelolaan tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;</p> <p>6. Pengembangan dan pembangunan serta optimalisasi fungsi dan peran pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.</p>

Sumber: Stranas PPDT (2017) dan RPJMD Banten 2017 - 2022 (Bappeda, 2017)

BAB IV  
SASARAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI  
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DI  
PROVINSI BANTEN

4.1 Penyebab Utama Ketertinggalan di Provinsi Banten

Berdasarkan analisis indeks ketertinggalan pada 113 (seratus tiga belas) kabupaten/kota di wilayah Jawa, terdapat 6 (enam) kabupaten sebesar 5,04% (lima koma nol empat persen) yang dikategorikan tertinggal dan 107 (seratus tujuh) kabupaten/kota sebesar 94,96% (sembilan puluh empat koma sembilan puluh enam persen) tidak tertinggal. Daftar kabupaten tertinggal dan penyebab utama ketertinggalan di wilayah Banten akan ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Penyebab Utama Ketertinggalan Kabupaten/Kota di Banten

No	Kabupaten	Penyebab Utama			
		1	2	3	4
1	Pandeglang	Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana	Karakteristik Daerah	Aksesibilitas
2	Lebak	Sumber Daya Manusia	Karakteristik Daerah	Sarana dan Prasarana	Aksesibilitas

Sumber: Draft Stanas PPDT (2017)

Tabel di atas menunjukkan bahwa antara Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang menjadi daerah tertinggal disebabkan oleh 4 (empat) kriteria utama yakni rendahnya kondisi sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, karakteristik daerah, serta aksesibilitas. Yang membedakan adalah faktor penyebab ketertinggalan kedua kabupaten tersebut adalah tingkat kelemahan kriteria sarana dan prasarana, yang mana Kabupaten Pandeglang memiliki sarana dan prasarana yang lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Lebak.

4.1.1. Faktor Penyebab Ketertinggalan Masing-masing Kriteria di Kabupaten Pandeglang

Hasil kajian yang dilakukan Kemendesa (2017) menunjukkan bahwa faktor penyebab masing-masing kriteria dengan menggunakan ukuran rata-rata 122 daerah tertinggal dan ukuran rata-rata 412 kabupaten di Indonesia. Dari 6 faktor penyebab ketertinggalan di Kabupaten Pandeglang, terdapat 4 faktor penyebab dengan 13 indikator dari 27 indikator yang telah ditetapkan oleh Kemendesa. Angka-angka yang ada di masing-masing sub indikator merupakan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kemendesa pada 2014-2015

(sebagai ukuran penetapan keteringgalan). Penetapan standar keteringgalan nasional dihitung dengan nilai rata-rata indikator dari seluruh kabupaten tertinggal sebanyak 122 kabupaten dan seluruh kabupaten sebanyak 415 kabupaten di Indonesia.

Untuk memudahkan dalam menetapkan kebijakan, maka pada bagian ini juga dipaparkan tentang tingkat keparahan keteringgalan setiap indikator penyebab dengan membandingkan kondisi indikator saat ini di Kabupaten Pandeglang dengan standar nasional. Jika rasio perbandingan diperoleh angka antara 3,22% - 17,40% maka termasuk kategori “Sangat Ringan”, rasio 18,40% - 32,58% adalah kategori “Ringan”, rasio antara 35,58% - 47,76% adalah kategori “Sedang”, rasio antara 48,76% - 62,94% adalah kategori “Berat”, serta rasio antara 63,94% - 78,12% adalah kategori “Sangat Berat”. Pilihan yang rasional untuk kebijakan prioritas dalam upaya mengentaskan keteringgalan adalah memilih indikator kategori berat dan sangat berat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Indikator Masing-Masing Faktor Penyebab Utama

Keteringgalan Kabupaten Pandeglang

Penyebab Keteringgalan	2015	Standar Nasional	%	Tingkat Keteringgalan
<b>Kriteria SDM</b>				
- Angka Harapan Hidup	62,91	65,00	3,22%	Sangat Ringan
<b>Kriteria Sarana dan Prasarana</b>				
- Jumlah jalan desa terluas yang diperkeras	131,00	33,92	74,11%	Sangat Berat
- Jumlah desa yang memiliki pasar tanpa bangunan	307,00	135,74	55,79%	Berat
- Jumlah fasilitas (prasarana) kesehatan per 1000 penduduk	0,28	1,29	78,29%	Sangat Berat
- Jumlah dokter per 1000 penduduk	0,08	0,22	63,64%	Berat
- Jumlah SD/SMP per 1000 penduduk	1,17	1,57	25,48%	Ringan
- Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih	43,66	55,55	21,40%	Ringan
<b>Kriteria Karakteristik Daerah</b>				
- Persentase jumlah desa rentan terkena gempa bumi	4,13	6,27	34,13%	Sedang
- Persentase jumlah desa yang longsor	13,57	7,99	41,12%	Sedang
- Persentase jumlah desa yang terkena banjir	39,53	20,36	48,49%	Sedang
- Persentase jumlah desa yang terkena bencana lainnya	29,79	18,81	36,86%	Sedang
- Persentase jumlah yang memiliki lahan kritis	2,06	1,46	29,13%	Ringan
<b>Kriteria Aksesibilitas</b>				
- Rata-rata jarak ke ibukota kabupaten (kilometer)	42,98	72,88	41,03%	Sedang
- Persentase jumlah desa yang memiliki akses ke pelayanan kesehatan (kilometer) > 5 km	14,00	22,16	36,82%	Sedang
Rata-Rata			39,30%	Sedang

Sumber: Kemendesa (2017), data diolah

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari masing-masing kriteria terdapat beberapa indikator penyebab ketertinggalan. Jumlah indikator penyebab ketertinggalan yang telah ditetapkan oleh Kemendesa sebanyak 27 indikator penyebab ketertinggalan. Dari 27 indikator tersebut, indikator penyebab ketertinggalan di Kabupaten Pandeglang adalah sebanyak 13 dari 27 indikator atau sebanyak 48,15% dari seluruh indikator yang telah ditetapkan. Adapun secara keseluruhan penyebab indikator ketertinggalan dapat dikatakan kategori sedang dengan nilai rasio 39,30%.

Selanjutnya, masing-masing indikator tersebut dibuat keterangan kategori kondisi ketertinggalannya dengan rentang sangat ringan – hingga sangat berat. Hasil perhitungan seperti pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa terdapat 4 indikator yang menjadi prioritas utama dalam kebijakan prioritas karena termasuk kategori berat dan sangat berat, yaitu jumlah jalan desa terluas yang diperkeras (74,11%), Jumlah fasilitas (prasarana) kesehatan per 1.000 penduduk (78,29%), jumlah dokter per 1.000 penduduk (63,64%), serta jumlah desa yang memiliki pasar tanpa bangunan permanen (55,79%). Sedangkan indikator lain termasuk kategori sedang dan sangat ringan.

#### 4.1.1.1. Faktor Penyebab Ketertinggalan Masing-masing Kriteria di Kabupaten Lebak

Hasil kajian yang dilakukan Kemendesa (2017) menunjukkan bahwa faktor penyebab masing-masing kriteria dengan menggunakan ukuran rata-rata 122 daerah tertinggal dan ukuran rata-rata 412 kabupaten di Indonesia. Dari 6 faktor penyebab ketertinggalan di Kabupaten Lebak, terdapat 4 faktor penyebab dengan 11 indikator atau 40,74% dari 27 indikator yang telah ditetapkan oleh Kemendesa pada 2015. Meskipun indikator ketertinggalan di Kabupaten Lebak lebih sedikit dibandingkan dengan Kabupaten Pandeglang, tetapi indikator penyebab ketertinggalan kategori berat dan sangat lebih banyak dibandingkan dengan Kabupaten Pandeglang dan secara keseluruhan skor ketertinggalannya 38,23%. Skor tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan skor Kabupaten Pandeglang.

Secara rinci, masing penyebab dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Indikator Masing-Masing Faktor Penyebab Utama  
Ketertinggalan Kabupaten Lebak

Penyebab Ketertinggalan	2015	Standar Nasional	%	Tingkat Ketertinggalan
<b>Kriteria SDM</b>				
- Rata-rata Lama Sekolah	5,44	6,37	14,60%	Sangat Ringan
<b>Kriteria Sarana dan Prasarana</b>				
- Jumlah desa yang memiliki pasar tanpa bangunan	302,00	135,74	55,05%	Berat
- Jumlah fasilitas (prasarana) kesehatan per 1000 penduduk	0,27	1,29	79,07%	Sangat Berat
- Jumlah dokter per 1000 penduduk	0,06	0,22	72,73%	Sangat Berat
- Jumlah SD/SMP per 1000 penduduk	1,14	1,57	27,39%	Ringan
- Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih	38,95	55,55	29,88%	Ringan
<b>Kriteria Karakteristik Daerah</b>				
- Persentase jumlah desa yang rawan longsor	25,22	7,99	68,32%	Sangat Berat
- Persentase jumlah desa yang terkena banjir	33,91	20,36	39,96%	Sedang
- Persentase jumlah yang memiliki lahan kritis	2,06	1,46	29,13%	Ringan
<b>Kriteria Aksesibilitas</b>				
- Rata-rata jarak ke ibukota kabupaten (kilometer)	60,56	72,88	16,90%	Sangat Ringan
- Persentase jumlah desa yang memiliki akses ke pelayanan kesehatan (kilometer) > 5 km	8,00	22,16	63,90%	Berat
Rata-Rata			38,23%	Sedang

Sumber: Kemendesra (2017), data diolah

Hasil perhitungan seperti pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa terdapat 5 indikator yang menjadi prioritas utama dalam kebijakan prioritas karena termasuk kategori berat dan sangat berat, yaitu jumlah fasilitas (prasarana) kesehatan per 1000 penduduk (79,07%), jumlah dokter per 1000 penduduk (72,73%), persentase jumlah desa yang memiliki akses ke pelayanan kesehatan (kilometer) > 5 km (63,90%), persentase jumlah desa yang rawan desa (68,32%), serta jumlah desa yang memiliki pasar tanpa bangunan permanen (55,05%). Sedangkan indikator lain termasuk kategori sedang dan sangat ringan.

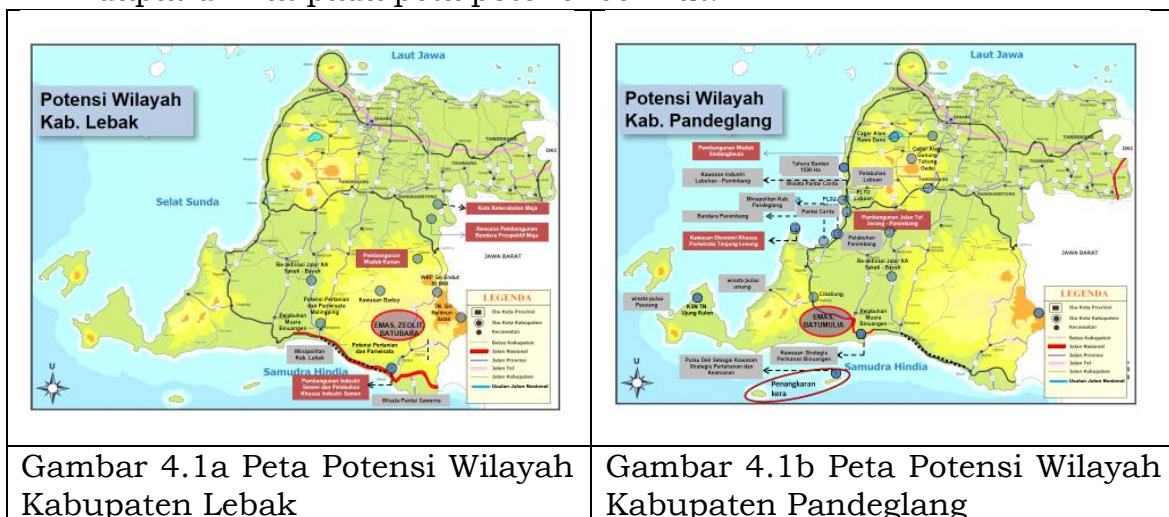
#### 4.2 Potensi dan Keterkaitan Wilayah

Pengembangan wilayah Jawa diprioritaskan pada percepatan keterkaitan dan manfaat antara kota dan desa, melalui penguatan sistem perkotaan nasional dengan cara peningkatan efisiensi pengelolaan kawasan perkotaan metropolitan di wilayah Jawa, yakni

kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan sektor primer sebagai sektor basis daerah tertinggal di wilayah Banten diarahkan untuk penguatan keterkaitan ekonomi lokal antara perkotaan dengan perdesaan, melalui integrasi perdesaan mandiri pada kawasan yang ada, dengan harapan akan menjadi kawasan agropolitan dan minapolitan serta kawasan pariwisata. Selain untuk meningkatkan nilai tambah, diharapkan dapat mentransformasikan struktur ekonomi kabupaten tertinggal di wilayah Jawa, dari sektor pertanian menjadi sektor industri dan jasa berbasis pendekatan kawasan agropolitan, minapolitan, dan kawasan pariwisata.

Pengembangan sektor unggulan daerah tertinggal di wilayah Banten Selatan yaitu (Kabupaten Pandeglang dan Lebak) dilakukan melalui peningkatan produktivitas di hulu (perikanan dan kelautan, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, percepatan industrialisasi berbasis industri, dan jasa, serta kawasan ekonomi yang mendukung percepatan pembangunan ekonomi. Potensi ini dapat dilihat pada peta potensi berikut:



Gambar 4.1a Peta Potensi Wilayah Kabupaten Lebak

Gambar 4.1b Peta Potensi Wilayah Kabupaten Pandeglang

Sumber: Bappeda Banten (2017), Pembangunan TOL Serang-Panimbang dilihat dari perspektif Perencanaan Pembangunan Wilayah

Untuk menunjang pengembangan sektor unggulan tersebut, diperlukan pengembangan ekonomi wilayah secara terintegrasi dari aspek hulu dan hilir (keterkaitan sektor) dengan meningkatkan konektivitas antara daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan/kawasan strategis yakni dengan Kawasan Ekonomi



Khusus Tanjung Lesung dan Kawasan Gerbangkertosusilo. Selanjutnya, orientasi pengembangan sektor tersebut ditujukan pada

gerai pemasaran di wilayah Jawa yakni ke Pusat Kegiatan Nasional Serang, Pusat Kegiatan Nasional Cilegon dan Pusat Kegiatan Nasional Gerbang Kertosusilo.

#### 4.3 Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Banten

##### 4.3.1. Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Lebak

Adapun sasaran yang ditetapkan sebagai upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal di wilayah Banten berdasarkan RPJMD Banten 2017 – 2022 dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.4. Sasaran PPDT Kabupaten Lebak

Sasaran	Tahun Dasar	Target						Intermediate Outcome	Tahun Dasar	Target						Intermediate Outcome	Tahun Dasar	Target					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Tertinggal (Persentase)	62,78	63,13	63,50	63,88	64,27	64,68	65,11	Kesehatan (Angka Harapan Hidup)	66,28	66,80	67,19	67,59	68,00	68,44	68,89	Jumlah Dokter per 1000 Penduduk	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10
								Harapan Lama Sekolah	11,91	11,98	12,05	12,12	12,19	12,27	12,35	Angka Partisipasi Sekolah SMP	94,59	93,47	94,45	95,69	96,94	98,21	99,49
								Standar hidup layak (PDRB Perkapita) (dalam ribuan rupiah)	13,772	14,821	15,602	15,915	16,352	17,004	17,671	Angka Partisipasi Sekolah SMA	45,27	46,49	46,49	47,62	48,75	49,88	51,02
Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Tertinggal (Persentase)	5,70	6,18	6,50	6,72	6,94	7,26	7,59	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (PDRB/Tenaga Kerja)	35,229	37,912	39,908	40,709	41,826	43,494	45,200	Peningkatan persentase desa dengan ketersediaan jalan memadai (jalan aspal)	50,29	52,84	53,79	55,30	56,81	58,33	59,88
Penurunan Persentase Penduduk Miskin (Persentase)	8,71	8,64	8,27	8,06	7,85	7,85	7,64	Penurunan Persentase Penduduk Miskin (Garis Kemiskinan)	246,389	255,956	266,769	277,581	288,394	299,206	310,019	Peningkatan persentase rumah tangga pengguna listrik & air bersih (Utilitas)	79,73	82,29	82,88	83,38	84,94	87,28	90,40

Sumber: Statistik Kesejahteraan Kabupaten Lebak (2016,2017), Banten Dalam Angka (2017), Proyeksi Penduduk Banten 2015 – 2025 (BPS Banten, 2016), Kabupaten Lebak Dalam Angka (2016, 2017), RPJMD Banten 2017-2022 (Bappeda, 2017), Ran. Stranas PDT (2017), data diolah

### 3.3.2 Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Pandeglang

Adapun sasaran yang ditetapkan sebagai upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Pandeglang berdasarkan RPJMD Banten 2017 – 2022 dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Sasaran PPDT Kabupaten Pandeglang

Sasaran	Tahun Dasar	Target						Intermediate Outcome	Tahun Dasar	Target						Immediate Outcome	Tahun Dasar	Target					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Tertinggal (Persentase)	63,40	63,75	64,12	64,51	64,90	65,32	65,75	Kesehatan (Angka Harapan Hidup) (%)	63,77	64,12	64,50	64,88	65,28	65,70	66,13	Jumlah Dokter per 1000 Penduduk	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12
								Harapan Lama Sekolah	13,40	13,47	13,55	13,63	13,72	13,81	13,90	Angka Partisipasi Sekolah SMP	91,75	93,54	94,69	95,55	96,41	97,27	98,13
								Standar hidup layak (PDRB Perkapita) (dalam ribuan)	14,057	15,170	15,872	16,354	16,845	17,430	18,079	Angka Partisipasi Sekolah SMA	53,45	53,95	55,29	56,63	57,99	59,33	60,68
Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Tertinggal (Persentase)	5,49	5,95	6,26	6,47	6,68	6,99	7,31	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (PDRB/Tenaga Kerja)	38,280	41,313	43,223	44,535	45,874	47,466	49,233	Peningkatan persentase desa dengan ketersediaan jalan memadai (jalan aspal)	58,90	61,89	63,00	64,77	66,54	68,31	70,13
Penurunan Persentase Penduduk Miskin (Persentase)	9,67	9,74	8,59	8,18	7,77	7,36	6,95	Penurunan Persentase Penduduk Miskin (Garis Kemiskinan)	267,752	278,149	289,899	301,649	313,399	325,149	336,899	Peningkatan persentase rumah tangga pengguna listrik & air bersih (Utilitas)	83,82	86,95	86,25	86,81	88,53	91,11	94,55

Sumber: Statistik Kesejahteraan Kabupaten Pandeglang (2016,2017), Banten Dalam Angka (2017), Proyeksi Penduduk Banten 2015 – 2025 (BPS Banten, 2016), Kabupaten Pandeglang Dalam Angka (2016, 2017), RPJMD Banten 2017-2022 (Bappeda, 2017), Ran. Stranas PDT (2017), data diolah.

4.4 Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Banten  
Arah Kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal di Wilayah Jawa adalah:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Promosi potensi daerah tertinggal dan pengembangan kemitraan untuk mempercepat pembangunan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan;
3. Pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik;
4. Mendukung pengembangan perekonomian masyarakat yang berbasis industri dan jasa; dan
5. Pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal terhadap perkotaan dan pusat pertumbuhan.

Tabel 4. 6 Sasaran Utama PDT, Arah Kebijakan PDT, dan Sasaran Kebijakan RPJMD Banten

Sasaran Umum PDT	Arah Kebijakan PDT Pulau Jawa (2015 – 2019)	Sasaran Strada PDT Banten	Arah Kebijakan PPDT Banten 2017 - 2022
Peningkatan IPM	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);	Pelayanan Kesehatan yang Sesuai dengan SPM	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan pelayanan kesehatan, Sumber daya kesehatan dan kefarmasian
		Pelayanan Pendidikan yang berkualitas	Peningkatan kualitas layanan pendidikan menengah dan khusus serta relevansi pendidikan
Pertumbuhan Ekonomi	Promosi potensi daerah tertinggal dan pengembangan kemitraan untuk mempercepat pembangunan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan;	Pertumbuhan Ekonomi daerah tertinggal yang optimal	Peningkatan aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika.
			Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan Irigasi
	Pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal terhadap perkotaan dan pusat pertumbuhan	Infrastruktur jalan dan jembatan di daerah tertinggal yang berkualitas	Peningkatan kualitas akses infrastruktur bagi masyarakat
	Mendukung pengembangan perekonomian masyarakat yang berbasis industri dan jasa;		Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jalan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis

Penduduk Miskin	Pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik;	Peningkatan aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional
			Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan kesehatan masyarakat, Pencegahan dan pengendalian penyakit
			Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampung dan Penyediaan Air Baku
			Penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh
		Peningkatan aksesibilitas Pendidikan	Peningkatan Akses layanan pendidikan menengah serta relevansi pendidikan
		Penanggulangan Banjir dan longsor	Peningkatan pencegahan banjir dan longsor

#### 4.5 Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Banten

##### 4.5.2 Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Pandeglang

###### 1. Kriteria Sumber Daya Manusia

- a. pemerataan distribusi tenaga pendidik di seluruh kabupaten daerah tertinggal;
- b. pengembangan program pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun di seluruh daerah tertinggal melalui pendekatan sosial budaya dan keagamaan;
- c. penyetaraan program pendidikan pondok pesantren;
- d. pengembangan kewirausahaan melalui pengembangan aktivitas ekonomi dan pengembangan sekolah kejuruan, dan pelatihan-pelatihan teknis;
- e. pengembangan pusat informasi pemasaran serta teknologi, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas para pelaku usaha khususnya sub-sektor perkebunan dan perikanan laut.
- f. penyetaraan pendidikan melalui program kejar paket paket C;
- g. penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional;
- h. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dan obat-obatan;

- i. peningkatan peran aktif masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan;
  - j. rehabilitasi rumah dinas medis, rehabilitasi rumah dinas paramedis, dan rehabilitasi rawat inap;
  - k. peningkatan sumber daya kader pos pelayanan terpadu (posyandu); dan
  - l. pengadaan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) keliling.
2. Kriteria Sarana dan Prasarana
- a. pembangunan infrastruktur jalan dan sarana transportasi desa;
  - b. pembangunan pasar kecamatan;
  - c. pengembangan fasilitas rumah sakit umum daerah pratama;
  - d. pemerataan distribusi tenaga kesehatan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terutama;
  - e. pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung wajib belajar;
  - f. peningkatan pelayanan prasarana permukiman, seperti pelayanan air minum, pengelolaan air limbah, dan pengelolaan sampah dan drainase; dan
  - g. pembangunan bandar udara Banten Selatan di Pandeglang.
3. Kriteria Karakteristik Daerah
- a. pengembangan sistem pengawasan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat;
  - b. pengembangan sistem manajemen penanganan bencana banjir dan bencana tanah longsor;
  - c. pelaksanaan dan monitoring rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
  - d. penyebaran dan peningkatan akses informasi kepada masyarakat; dan
  - e. konservasi sumber daya kawasan berlahan kritis.
4. Kriteria Aksesibilitas
- a. Peningkatan kualitas dan konektivitas jalan kabupaten Lebak menuju kota-kota yang ada, khususnya kota kabupaten;
  - b. Perluasan akses kesehatan bagi penduduk miskin.

### 3.5.1 Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Lebak

#### 1. Kriteria Sumber Daya Manusia

- a. pemerataan distribusi tenaga pendidik di seluruh kabupaten daerah tertinggal;
- b. pengembangan program pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun di seluruh daerah tertinggal melalui pendekatan sosial budaya dan keagamaan;
- c. penyetaraan program pendidikan pondok pesantren;
- d. pengembangan kewirausahaan melalui pengembangan aktivitas ekonomi dan pengembangan sekolah kejuruan, dan pelatihanpelatihan teknis;
- e. pengembangan pusat informasi pemasaran serta teknologi, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas para pelaku usaha khususnya sub-sektor perkebunan dan perikanan laut.
- f. penyetaraan pendidikan melalui program kejar paket paket C;
- g. penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional;
- h. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dan obat-obatan;
- i. peningkatan peran aktif masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan;
- j. rehabilitasi rumah dinas medis, rehabilitasi rumah dinas paramedis, dan rehabilitasi rawat inap;
- k. peningkatan sumber daya kader pos pelayanan terpadu (posyandu); dan
- l. pengadaan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) keliling.

#### 2. Kriteria Karakteristik Daerah

- a. pengembangan sistem pengawasan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat;
- b. pengembangan sistem manajemen penanganan bencana banjir dan bencana tanah longsor;
- c. pelaksanaan dan monitoring rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; dan
- d. penyebaran dan peningkatan akses informasi kepada masyarakat;



### 3. Kriteria Sarana dan Prasarana

- a. pembangunan infrastruktur jalan dan sarana transportasi desa;
- b. pembangunan pasar kecamatan;
- c. pengembangan fasilitas rumah sakit umum daerah pratama;
- d. pemerataan distribusi tenaga kesehatan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terutama;
- e. pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung wajib belajar; dan
- f. peningkatan pelayanan prasarana permukiman, seperti pelayanan air minum, pengelolaan air limbah, dan pengelolaan sampah dan drainase terutama.

### 4. Kriteria Aksesibilitas

- a. Peningkatan kualitas dan konektivitas jalan kabupaten Lebak menuju kota-kota yang ada, khususnya kota kabupaten;
- b. Perluasan akses kesehatan bagi penduduk miskin.

BAB V  
PENUTUP

Demikian STRADA-PPDT Provinsi Banten 2017 - 2022 ini disusun untuk menjadi pedoman perencanaan strategis dalam mencapai sasaran percepatan pembangunan daerah tertinggal baik di tingkat Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak, agar koordinasi antara kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, serta pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran dapat berjalan secara efektif dan efisien.

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680805 199803 1 010